



**PENGARUH PRINSIP KEADILAN, TRANSPARANSI
DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN
ANGGARAN TERHADAP PRODUKTIVITAS
SEKOLAH (Persepsi Guru SMP N 3 Mertoyudan
Magelang)**

SKRIPSI

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
Pada Universitas Negeri Semarang**

Oleh

M. Hidayat Dwi Setyawan

NIM 7101410051

**JURUSAN PENDIDIKAN EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2015**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian skripsi pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 21 Agustus 2015

Mengetahui,

Ketua Jurusan Pendidikan Ekonomi



Dr. Ade Rustiana, M.Si.

NIP. 196801021992031002

Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, which appears to be 'Rediana Setiyani'.

Rediana Setiyani, S.Pd., M.Si.

NIP. 197912082006042002

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas
Ekonomi Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 18 Agustus 2015

Penguji I



Ahmad Nurkhin, S.Pd., M.Si.
NIP. 198201302009121005

Penguji II



Lyna Latifah, S.Pd., S.E., M.Si
NIP. 198307052005011002

Penguji III



Rediana Setiyani, S.Pd., M.Si.
NIP. 197912082006042002

Mengetahui,

Dean Fakultas Ekonomi



Dr. Wahyuno, M.M.

NIP. 195601031983121001

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini adalah jiplakan dari karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, September 2015



M. Hidayat Dwi Setyawan

NIM 7101410051

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Hidup itu seperti mengendarai sepeda. Agar tetap seimbang, kau harus tetap bergerak.” (Albert Einstein dalam surat untuk anaknya, Eduard, 5 Februari 1930)

PERSEMBAHAN

Untuk orang tuaku, kawan, serta almamater UNNES yang selalu membuat senang, serta memberi dukungan kepadaku untuk terus maju.

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PENGARUH PRINSIP KEADILAN, TRANSPARANSI, DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ANGGARAN TERHADAP PRODUKTIVITAS SEKOLAH (Studi Kasus di SMP N 3 Mertoyudan Magelang)”**.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. selaku Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan di Universitas Negeri Semarang;
2. Dr. Wahyono, M.M., Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang yang telah mengesahkan skripsi ini;
3. Ade Rustiana, Ketua Jurusan Pendidikan Ekonomi yang telah memberikan izin penelitian ini;
4. Rediana Setiyani, S.Pd, M.Si, Dosen Pembimbing yang telah sabar membimbing dan memberi arahan bagi peneliti dalam penyusunan skripsi ini;
5. Ahmad Nurkhin, S.Pd., M.Si, Dosen Penguji 1 yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini;

6. Lyna latifah, S.Pd. S.E, M.Si, Dosen Penguji 2 yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini;
 7. Dra. Nanik Istantri Nugrahantini, M.Pd, selaku Kepala SMP N 3 Mertoyudan Magelang yang telah memberikan izin untuk melaksanakan penelitian ini;
 8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan dan telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik dan lancar;
- Semoga segala bantuan dan kebaikan yang diberikan kepada penulis mendapat imbalan yang mulia dari Allah SWT. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca. Amin.

Semarang, September 2015



Penyusun

SARI

Setyawan, M. Hidayat Dwi. 2015. Pengaruh Prinsip Keadilan, Transparansi, dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Terhadap Produktivitas Sekolah (Persepsi Guru SMP N 3 Mertoyudan Magelang) Skripsi. Jurusan Pendidikan Ekonomi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing. Rediana Setiyani, S.Pd, M.Si.

Kata Kunci: Produktivitas Sekolah, Prinsip Keadilan, Transparansi, Akuntabilitas

Produktivitas merupakan salah satu komponen untuk meningkatkan mutu pendidikan. Berdasarkan observasi awal, data hasil ujian nasional yang diperoleh dari dinas pendidikan menunjukkan bahwa SMP N 3 Mertoyudan Magelang merupakan sekolah negeri dengan peringkat paling rendah. Selain itu, tingkat transparansi sekolah masih belum dapat dikatakan baik karena tidak semua masyarakat memperoleh laporan penggunaan dana APBS. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah ada pengaruh positif prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan anggaran secara simultan maupun parsial terhadap produktivitas sekolah dengan SMP N 3 Mertoyudan Magelang sebagai objek penelitian.

Populasi dalam penelitian ini adalah guru SMP N 3 Mertoyudan Magelang dengan jumlah 31 guru, dan menggunakan sampel jenuh karena semua anggota populasi menjadi sampel. Tahapan prosedur dari penelitian ini yaitu pengumpulan data menggunakan angket dan wawancara, pengolahan data menggunakan analisis deskriptif persentase dan statistik inferensial, serta penginterpretasian data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas berpengaruh terhadap produktivitas sekolah sebesar 75,9%. Sedangkan secara parsial prinsip keadilan berpengaruh sebesar 22,09%, transparansi berpengaruh sebesar 18,23%, dan akuntabilitas berpengaruh sebesar 16,89% terhadap produktivitas sekolah.

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa ada pengaruh prinsip keadilan, transparansi, akuntabilitas pengelolaan anggaran terhadap produktivitas sekolah baik secara simultan maupun parsial. Saran yang diberikan dalam penelitian ini adalah sekolah diharapkan dapat melaksanakan prinsip-prinsip pengelolaan anggaran pendidikan dalam mengelola keuangan sekolah; mewujudkan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan sekolah untuk meningkatkan kepercayaan publik; serta, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperbanyak ruang lingkup sampel yang tidak hanya satu sekolah, tapi dalam cakupan yang lebih luas untuk pemetaan daerah dengan tingkat produktivitasnya.

ABSTRACT

Setyawan, M. Hidayat Dwi. 2015. The Influence of Fairness Principle, Transparency, and Accountability Budget Management on Productivity Schools in SMP N 3 Mertoyudan Magelang. Thesis. Department of Economic Education. Faculty Of Economics. Semarang State University. Supervisor. Radiana Setiyani, S.Pd, M.Sc.

Keywords: Productivity Schools, Fairness Principle, Transparency, Accountability

Productivity is one of the components to improve the quality of education. Based on preliminary observations, the national exam result data obtained from the education department showed that the SMP N 3 Mertoyudan Magelang is a public school with the lowest rank. In addition, level of transparency the school can't be said to be good because not all people have a report use of funds budgets. The purpose of this study was to determine whether there is a positive effect of the fairness principle, transparency, and accountability in the management of budgets simultaneously and partially on the productivity of the SMP N 3 Mertoyudan Magelang as research objects.

Sample in this research is a teacher of SMP N 3 Mertoyudan Magelang with a total of 31 teachers. The results showed that simultaneous fairness principle, transparency, and accountability positive influence on school productivity by 75.9%. While partially principles of fairness influence of 22.09%, transparency influence by 18.23%, and accountability by 16.89% on the productivity of the school.

Based on the results of the study concluded that there was the influence of the fairness principle, transparency, and accountability budget management on the productivity of both schools simultaneously or partially. The advice is school can be expected to implement the principles of budget management in the financial management of school education; actualize the fairness principle, transparency, and accountability in financial management of the school to increase public confidence; and, further research is expected to expand the scope of the sample that is not only a school, but in a comprehensive scope for mapping areas with the levels of productivity.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KELULUSAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
PRAKATA	vi
SARI	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
BAB II TELAAH TEORI	12
2.1 Produktivitas Sekolah	12
2.1.1 Definisi Produktivitas Sekolah.....	12
2.1.2 Faktor yang Mempengaruhi Produktivitas	14

2.1.3 Indikator Produktivitas.....	16
2.2 Anggaran Pendidikan	17
2.2.1 Definisi Anggaran Pendidikan	17
2.2.2 Sumber Anggaran Pendidikan	18
2.2.3 Bantuan Operasional Sekolah	19
2.2.4 Manajemen Anggaran Pendidikan	20
2.3 Penyelenggaran Pendidikan.....	22
2.3.1 Definisi Penyelenggara Pendidikan	22
2.3.2 <i>Good Governance</i>	23
2.3.3 Sekolah Bermutu Terpadu.....	25
2.4 Prinsip Keadilan	29
2.4.1 Pengertian Prinsip Keadilan	29
2.4.2 Tujuan Prinsip Keadilan.....	30
2.4.3 Indikator Prinsip Keadilan	30
2.4.4 Indikator Keberhasilan Prinsip Keadilan	31
2.5 Transparansi.....	32
2.5.1 Pengertian Transparansi	32
2.5.2 Tujuan Transparansi.....	33
2.5.3 Indikator Transparansi	33
2.5.4 Indikator Keberhasilan Transparansi	34
2.6 Akuntabilitas.....	34
2.6.1 Pengertian Akuntabilitas	34
2.6.2 Tujuan Akuntabilitas	35

2.6.3 Indikator Akuntabilitas.....	36
2.6.4 Indikator Keberhasilan Akuntabilitas	37
2.7 Kerangka Berpikir	37
2.8 Hipotesis Penelitian	43
BAB III METODE PENELITIAN	44
3.1. Desain Penelitian	44
3.2. Populasi dan Sampel	44
3.3. Variabel Penelitian	45
3.4. Metode Pengumpulan Data	47
3.5. Analisis Instrumen.....	48
3.5.1 Uji Validitas	48
3.5.2 Uji Reliabilitas Instrumen.....	52
3.6. Metode Analisis Data	53
3.6.1 Analisis Deskriptif.....	53
3.6.2 Analisis Statistik Inferensial.....	54
3.6.2.1 Uji Asumsi Klasik	55
3.7. Uji Hipotesis.....	57
3.7.1 Uji Simultan (Uji F).....	57
3.7.2 Uji Parsial (Uji t).....	58
3.8. Uji Koefisiensi Determinasi	59
3.8.1 Koefisien Determinasi (R^2).....	59
3.8.2 Koefisien Determinasi Parsial (r^2).....	59
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	60

4.1. Hasil Penelitian.....	60
4.1.1 Analisis Deskriptif.....	60
4.1.2 Analisis Statistik Inferensial.....	68
4.1.2.1 Uji Asumsi Klasik.....	68
4.1.2.2 Analisis Hipotesis Penelitian.....	74
4.1.2.3 Analisis Koefisien Determinasi.....	76
4.2. Pembahasan	78
4.2.1 Pengaruh Prinsip Keadilan, Transparansi, dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Terhadap Produktivitas Sekolah	78
4.2.2 Pengaruh Prinsip Keadilan Pengelolaan Anggaran Terhadap Produktivitas Sekolah	82
4.2.3 Pengaruh Transparansi Pengelolaan Anggaran Terhadap Produktivitas Sekolah	84
4.2.4 Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Terhadap Produktivitas Sekolah	86
BAB V PENUTUP	90
5.1. Simpulan	90
5.2. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN	95

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1. Hasil Ujian Nasional SMP N Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang Tahun 2013/2014.....	3
Tabel 3.1. Hasil Uji Validitas Instrumen Variabel Produktivitas	49
Tabel 3.2. Hasil Uji Validitas Instrumen Variabel Prinsip Keadilan.....	50
Tabel 3.3. Hasil Uji Validitas Instrumen Variabel Transparansi.....	51
Tabel 3.4. Hasil Uji Validitas Instrumen Variabel Akuntabilitas	51
Tabel 3.5. Hasil Uji Reliabilitas Instrumen	52
Tabel 3.6. Kriteria Analisis Deskriptif Persentase Variabel	54
Tabel 4.1. Hasil Analisis Statistik Deskriptif Variabel Produktivitas Sekolah.....	60
Tabel 4.2. Deskripsi Indikator Variabel Produktivitas Sekolah	61
Tabel 4.3. Hasil Analisis Statistik Deskriptif Variabel Prinsip Keadilan .	62
Tabel 4.4. Deskripsi Indikator Variabel Prinsip Keadilan	63
Tabel 4.5. Hasil Analisis Statistik Deskriptif Variabel Transparansi	64
Tabel 4.6. Deskripsi Indikator Variabel Transparansi	65
Tabel 4.7. Hasil Analisis Statistik Deskriptif Variabel Akuntabilitas	66
Tabel 4.8. Deskripsi Indikator Variabel Akuntabilitas	67
Tabel 4.9. Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test dengan Produktivitas Sekolah sebagai Variabel Dependen.....	68
Tabel 4.10. Hasil Uji Multikolonieritas dengan Produktivitas Sekolah sebagai Variabel Dependen	69

Tabel 4.11. Hasil Uji Heterokedastisitas dengan Produktivitas Sekolah sebagai Variabel Dependen	70
Tabel 4.12. Hasil Uji Linieritas Prinsip Keadilan.....	71
Tabel 4.13. Hasil Uji Linieritas Transparansi	71
Tabel 4.14. Hasil Uji Linieritas Akuntabilitas	72
Tabel 4.15. Hasil Uji Regresi Linier Berganda dengan Produktivitas Sekolah sebagai Variabel Dependen.....	73
Tabel 4.16. Hasil Uji F dengan Produktivitas Sekolah sebagai Variabel Dependen	74
Tabel 4.17. Hasil Uji t dengan Produktivitas Sekolah sebagai Variabel Dependen	75
Tabel 4.18. Koefisien Determinasi antara Prinsip Keadilan, Transparansi, dan Akuntabilitas terhadap Produktivitas Sekolah	76
Tabel 4.19. Hasil Uji r^2	77

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Gambar Kerangka Berpikir	42

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Hasil Wawancara Observasi Awal.....	95
Lampiran 2. Kisi-kisi Instrumen Uji Coba Penelitian	96
Lampiran 3. Angket Uji Coba Penelitian	97
Lampiran 4. Daftar Nama Responden Uji Coba.....	100
Lampiran 5. Tabulasi Data Uji Coba Penelitian.....	101
Lampiran 6. Hasil Perhitungan Validitas Instrumen Penelitian	105
Lampiran 7. Hasil Perhitungan Reliabilitas Instrumen.....	112
Lampiran 8. Daftar Nama Responden Penelitian	113
Lampiran 9. Kisi-kisi Instrumen Penelitian.....	114
Lampiran 10. Instrumen Penelitian.....	115
Lampiran 11. Data Hasil Penelitian.....	119
Lampiran 12. Analisis Deskriptif Persentase Variabel X dan Y	127
Lampiran 13. Lampiran Output SPSS Uji Asumsi Klasik	129
Lampiran 14. Lampiran Output SPSS Uji Hipotesis	130
Lampiran 15. Surat Ijin Penelitian	131
Lampiran 16. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	132

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Secara umum produktivitas diartikan sebagai hubungan antara hasil nyata maupun fisik (barang-barang atau jasa) dengan masukan yang sebenarnya (Sinungan, 2009:12). Thomas (2013) mengungkapkan bahwa jika dikaitkan dengan kinerja maka mengarah pada efektivitas dan efisiensi. Lebih lanjut lagi, menurut Thomas (1971:12-13) dalam Thomas (2013) produktivitas sekolah mencakup tiga fungsi, yaitu keluaran administratif, keluaran perilaku dan keluaran ekonomi/ peningkatan nilai tambah. Keluaran administrasi ditunjukkan seberapa baik layanan yang dapat diberikan guru, kepala sekolah, karyawan dalam proses pendidikan. Keluaran perilaku ditunjukkan, dengan prestasi akademik dan prestasi nonakademik. Keluaran ekonomi dan peningkatan nilai tambah ditunjukkan dengan perolehan siswa setelah selesainya program. Masih rendahnya produktivitas sekolah dapat berdampak pada rendahnya mutu sekolah itu sendiri.

Bagi para pemerhati pendidikan, prestasi pendidikan di Indonesia masih menjadi salah satu aspek yang membuat munculnya berbagai macam pertanyaan tentang bagaimana pola pendidikan yang baik. Perlu adanya usaha untuk menggerakkan sumber daya yang produktif guna memperbaiki prestasi tersebut. Bandingkan dengan negara berkembang lainnya di Asia Tenggara, pendidikan di Indonesia sebegitu terpuruknya, bahkan, butuh banyak perbaikan untuk sekedar mampu bersaing dengan Malaysia ataupun Singapura yang sudah melangkah

lebih jauh menghasilkan para lulusan yang bermutu. Apabila terus berlanjut, dikhawatirkan Indonesia akan kesulitan menghadapi berbagai tantangan di masa depan termasuk yang paling dekat dan ada di depan mata *Asean Economics Community* yang akan segera berlaku pada 1 Januari 2016.

Menurut Sumardi (2005), ada tiga tantangan besar yang harus dihadapi pendidikan di Indonesia, yakni: sebagai akibat krisis ekonomi, pendidikan nasional dituntut untuk dapat mempertahankan hasil-hasil pembangunan pendidikan yang telah dicapai. Selanjutnya, untuk mengantisipasi era globalisasi, pendidikan nasional dituntut untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten agar mampu bersaing dalam pasar kerja global. Kemudian, sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah, perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian sistem pendidikan nasional sehingga dapat mewujudkan pendidikan yang lebih demokratis, memperhatikan keberagaman kebutuhan, keadaan daerah, dan peserta didik, serta mendorong partisipasi masyarakat.

Pendidikan di Indonesia saat ini tentu harus mengubah paradigmanya. Sekolah mesti belajar untuk berjalan dengan sumber daya yang ada. Para profesional pendidikan harus membantu para siswa mengembangkan keterampilan yang akan mereka butuhkan untuk bersaing dengan perekonomian global. Sayangnya, kebanyakan dari sekolah masih memandang bahwa produktivitas akan meningkat hanya jika pemerintah dan masyarakat bersedia memberi dana yang lebih besar. Padahal, mereka masih menggunakan dana yang ada secara asal dan tanpa berbasis secara efektif dan efisien.

Bila mutu pendidikan hendak diperbaiki, maka perlu ada campur tangan dari profesional pendidikan itu sendiri. Manajemen sekolah merupakan sarana yang memungkinkan bagi para profesional pendidikan untuk membangun kembali mutu yang saat ini sedang diambang kebobrokan karena pengelolaan sistem pendidikan yang tidak baik. Mutu pendidikan akan meningkat bila administrator, guru, staf, dan komite sekolah mulai merubah arah pandangannya dan mulai fokus pada pembangunan produktivitas sekolah.

Contoh kasus diambil dari SMP negeri di kecamatan Mertoyudan kabupaten Magelang. Menurut data yang diperoleh dari Dinas Pendidikan kabupaten Magelang, hasil ujian nasional SMP N 2 Mertoyudan menempatkan sekolah pada peringkat tertinggi. Berbeda dengan SMP Negeri 3 Mertoyudan, yang berada di posisi kurang menggembirakan. Hasil ujian nasional menerangkan bahwa sekolah tersebut berada di posisi paling bawah diantara tiga sekolah negeri yang ada di kecamatan Mertoyudan.

Berikut daftar urutan sekolah di kecamatan Mertoyudan kabupaten Magelang berdasarkan hasil ujian nasional tahun pelajaran 2013/2014.

Tabel 1.1.
Hasil Ujian Nasional
SMP Negeri Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang
Tahun Pelajaran 2013/2014

NAMA SEKOLAH	NILAI				JUMLAH	RATA-RATA
	B. Ind	B. Ing	Mat	IPA		
SMP N 2 Mertoyudan	8.25	7.83	7.59	7.53	31.20	7.80
SMP N 1 Mertoyudan	8.26	6.97	6.75	7.04	29.02	7.26
SMP N 3 Mertoyudan	7.95	6.68	6.07	6.81	27.51	6.88

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang

Dari data tabel mengungkapkan bahwa SMP N 3 Magelang berada di peringkat akhir dengan nilai rata-rata 6.88. di bawah dua sekolah lain yaitu SMP

N 2 Mertoyudan dan SMP N 1 Mertoyudan dengan nilai rerata secara berurutan 7.80 dan 7.26. walaupun hasil ujian nasional bukan satu-satunya penentu standar mutu dan masih ada beberapa indikator lain, namun secara sederhana berdasarkan data yang tersaji tersebut dapat dikatakan bahwa SMP N 3 Mertoyudan merupakan sekolah negeri dengan tingkat produktivitas terendah yang ada di kecamatan Mertoyudan kabupaten Magelang.

Dari hasil wawancara dengan pengelola BOS di SMP N 3 Mertoyudan, diperoleh fakta bahwa belum ada pengelola khusus dana BOS. Pengelola BOS yang ada saat ini diambil dari beberapa staf tata usaha dan guru mata pelajaran. Padahal, staf khusus yang independen dalam pengelolaan anggaran menjadi syarat yang tertuang di dalam petunjuk teknis penggunaan dana BOS. Dengan pengelola yang ada sekarang ini, dikhawatirkan timbul masalah karena ketidakprofesionalan dan berdampak pada menurunnya tingkat produktivitas sekolah.

Produktivitas setiap “produk” perlu pembiayaan. Bahkan, biaya pendidikan merupakan salah satu komponen masukan instrumental yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Hampir tidak ada upaya pendidikan yang dapat mengabaikan peranan biaya, sehingga dapat dikatakan bahwa tanpa biaya proses pendidikan (di sekolah) tidak akan berjalan. Biaya dalam hal ini memiliki cakupan yang luas, yakni semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggara pendidikan, baik berupa uang maupun barang dan tenaga.

Dalam sistem anggaran di Indonesia, alokasi biaya rutin kepada lembaga-lembaga atau satuan-satuan penyelenggara pendidikan dituangkan dalam DIP (Daftar Isian Proyek). Di samping itu dikenal pula DIKS (Daftar Isian Kegiatan

Suplemen), yaitu alokasi anggaran yang sumber dananya berasal dari masyarakat. Penyaluran subsidi pemerintah ke satuan-satuan pendidikan dapat berupa uang yang telah jelas diperuntukan, dana tambahan berbentuk hibah, atau berupa tenaga dan barang seperti guru/tenaga kependidikan, buku-buku pelajaran, dan perlengkapan sekolah (Supriadi, 2003:5).

Semenjak bulan Maret 2005, sebagai salah satu upaya pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun pemerintah melakukan suatu terobosan dalam bidang pembiayaan pendidikan yang diberi nama dana bantuan operasional sekolah (BOS). Dana bantuan operasional sekolah awalnya merupakan suatu bentuk kompensasi dari kenaikan bahan bakar minyak, dan pada tahun 2005 dikeluarkan dana sebesar Rp 6.2 triliun dibagikan kepada hampir semua sekolah di seluruh Indonesia. Mekanisme kebijakan sudah beberapa kali diperbaiki termasuk pada tahun 2009 pemerintah melakukan perubahan kebijakan antara lain mencakup penggunaan dana, biaya satuan bos yang mengalami peningkatan sekitar 50 persen, serta tuntutan transparansi akuntabilitas pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (www.bos.kemendikbud.go.id). Namun, hingga sekarang, permasalahan tentang pengelolaan dana tersebut selalu ada dan muncul dari tahun ke tahun.

Menurut data yang dilansir dalam situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mulai tahun 2011 hingga 2014 terdapat 562 pengaduan tentang penyimpangan peraturan serta 113 pengaduan tentang penyimpangan dana. Dari segenap penyelewengan serta penyimpangan yang terjadi tidak semuanya disebabkan karena faktor kesengajaan, melainkan muncul

juga dari berbagai kesalahpahaman tentang pengelolaan penyelenggaraan pendidikan.

Pada 2014, sektor pendidikan mendapatkan alokasi dana dari pemerintah sebesar 20% dari APBN atau sekitar Rp 368 triliun yang tentu saja sebagai upaya peningkatan mutu. Sebagian besar atau Rp 268 triliun, ditransfer ke daerah melalui berbagai alokasi, seperti dana alokasi khusus dan dana alokasi umum. Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, meski mendapat alokasi dana besar, namun fakta ironi menunjukkan 30 juta anak tidak bisa sekolah. Selain itu, masih banyak dijumpai infrastruktur yang rusak, serta 296 kasus korupsi dana pendidikan yang terungkap pada 2003-2013 yang menyeret 479 tersangka. Irjen Kemendikbud Haryono Umar menyebutkan, sumber permasalahan dalam pengelolaan anggaran pendidikan adalah tidak adanya pihak yang mengawasi. Padahal, anggaran pendidikan bisa dibilang sangat besar. Tim korusup pendidikan telah memetakan lima masalah, antara lain: lemahnya pengendalian internal, lemahnya sistem administrasi, lemahnya kontrol publik, adanya kekosongan dalam implementasi pengawasan, serta minimnya sumber daya untuk mengawasi dana pendidikan (www.republika.co.id).

Untuk mencapai tujuan dari pendidikan itu sendiri, perlu perwujudan tata kelola yang baik (*good governance*) dan bersih secara umum, berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan dan transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien, menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, responsif, dan membuka partisipasi masyarakat, merupakan tuntutan sekaligus kebutuhan yang mutlak untuk mencapai tujuan pembangunan. Pelaksanaan *Good Governance* sangat

diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat dan dunia internasional sebagai syarat mutlak bagi perusahaan untuk berkembang dengan baik dan sehat.

Good governance pada intinya adalah mengenai suatu sistem, proses, dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). *Good governance* dimaksudkan untuk mengatur hubungan ini dan mencegah terjadinya kesalahan (*mistakes*) signifikan dalam strategi korporasi dan untuk memastikan bahwa kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki dengan segera.

Dalam PP No 48 tahun 2008, terdapat prinsip umum dalam pengelolaan dana pendidikan oleh pemerintah, pemerintah daerah, penyelenggara dan satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat. Prinsip umum sebagaimana dimaksud meliputi prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas publik. Dengan adanya prinsip tersebut diharapkan manajemen organisasi dapat menentukan pemicu biaya agar dapat dilakukan strategi pemaksimalan pengelolaan anggaran, sehingga tidak terjadi pemborosan anggaran yang berdampak buruk bagi kesejahteraan sekolah itu sendiri.

Kebijakan yang dilaksanakan pemerintah dalam mencapai pendidikan yang berkeadilan khususnya dalam pembiayaan pendidikan tercantum dalam Renstra Ditjen Dikmen 2010-2014. Kebijakan tersebut diantaranya adalah menyediakan Bantuan Siswa Miskin (BSM) untuk 308.000 peserta didik miskin dengan alokasi lebih dari Rp 240 miliar. Alokasi anggaran beasiswa miskin tersebut belum mencukupi seluruh kebutuhan untuk membantu peserta didik miskin. Hal tersebut bila dilihat dari *unit cost*-nya (Rp 780.000 per peserta didik per tahun) maupun

jumlah sarannya (308.000 peserta didik atau sekitar 8% dari jumlah peserta didik Sekolah Menengah) (Raeni, 2014).

Transparansi dalam hal ini perlu adanya keterbukaan dari pihak sekolah tentang bagaimana penggunaan dana yang ada, tanpa berusaha untuk menutupi. Penelitian Sakapurnama dan Safitri yang berjudul “*Good Governance Aspect in Implementation of The Transparency of Public Information Law*” mengungkapkan bahwa keterbukaan manajemen pemerintahan dapat membantu memperbaiki implementasi *good governance*. Oleh karena itu, pihak pemegang kepentingan misalnya komite sekolah serta masyarakat juga perlu tahu dan ikut mengawasi penggunaan dana tersebut sehingga tidak terjadi penyalahgunaan.

Akuntabilitas pengelolaan perlu dikedepankan karena akuntabilitas yang “kecil” di tingkat sekolah hanya akan menghambat perkembangan sekolah itu sendiri. Selain itu, tanpa akuntabilitas yang baik maka penggunaan anggaran yang bersifat efektif dan efisien juga akan gagal tercapai. Yang ada, penggunaan dana yang tidak sesuai dengan kebutuhan akan membuat prestasi sekolah menjadi semakin terpuruk karena gagal membawa ke arah tujuan yang ingin dicapai. Selain itu, dengan adanya akuntabilitas pengelolaan anggaran akan mengurangi praktek tindak pidana korupsi yang sekarang sedang marak diberitakan.

Penelitian Thomas (2013) yang berjudul “Faktor Determinan Produktivitas Sekolah” mengungkapkan bahwa produktivitas di SMK bisnis manajemen di Eks-Keresidenan Surakarta dipengaruhi oleh mutu proses, kompetensi guru, budaya organisasi sekolah, pembiayaan, kepemimpinan kepala sekolah dan peran komite

sekolah. Pengaruhnya sebesar 73% sisanya dipengaruhi variabel lain di luar model.

Pendekatan studi biaya pendidikan mencerminkan kontruk berpikir, keyakinan-keyakinan, dan asumsi-asumsi –baik eksplisit maupun implisit– peneliti (Supriadi, 2003). Ditambah dengan penelitian Raeni (2014) yang mengungkapkan bahwa Prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan sekolah secara simultan berpengaruh terhadap produktivitas SMK se-Kabupaten Kendal sebesar 74,9%. Maka, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut bagaimana pengelolaan anggaran pendidikan berbasis produktivitas sekolah dengan judul “**Pengaruh Prinsip Keadilan, Transparansi, dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Terhadap Produktivitas Sekolah (Persepsi Guru SMP N 3 Mertoyudan Magelang)**”. Dengan variabel prinsip keadilan, transparansi, serta akuntabilitas sebagai prinsip pengelolaan anggaran terhadap produktivitas dan memilih SMP N 3 Mertoyudan karena sekolah tersebut berada pada urutan terendah dalam nilai ujian nasional di kecamatan Mertoyudan kabupaten Magelang.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis merumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu :

1. Adakah pengaruh prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan anggaran terhadap produktivitas sekolah?

2. Adakah pengaruh prinsip keadilan pengelolaan anggaran terhadap produktivitas sekolah?
3. Adakah pengaruh transparansi pengelolaan anggaran terhadap produktivitas sekolah?
4. Adakah pengaruh akuntabilitas pengelolaan anggaran terhadap produktivitas sekolah?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas maka dapat diperoleh tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk melihat pengaruh prinsip keadilan, transparansi, serta akuntabilitas pengelolaan anggaran terhadap produktivitas sekolah.
2. Untuk melihat pengaruh prinsip keadilan pengelolaan anggaran terhadap produktivitas sekolah.
3. Untuk melihat pengaruh transparansi pengelolaan anggaran terhadap produktivitas sekolah.
4. Untuk melihat pengaruh akuntabilitas pengelolaan anggaran terhadap produktivitas sekolah.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis:

- a. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian pengambilan keputusan dalam penentuan RAPBS, serta sebagai acuan bagaimana pengelolaan anggaran yang baik.
2. Manfaat praktis:
- a. Bagi mahasiswa, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi penelitian sejenis.
 - b. Bagi sekolah, penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman pengelolaan anggaran ditahun yang akan datang.
 - c. Bagi pemerintah, penelitian ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam pengambilan kebijakan dalam bidang pengelolaan keuangan sekolah.

BAB II

TELAAH TEORI

2.1 Produktivitas Sekolah

2.1.1 Definisi Produktivitas Sekolah

Sinungan (2009:1) mengungkapkan pada dasarnya produktivitas mencakup sikap mental patriotik yang memandang hari depan secara optimis dengan berakar pada keyakinan diri bahwa kehidupan hari ini adalah lebih baik dari hari kemarin dan hari esok adalah lebih baik dari hari ini. Horngren (2012) menjelaskan bahwa produktivitas mengukur hubungan antara *input* yang aktual yang digunakan dan *output* aktual yang dihasilkan. Sedangkan dalam doktrin pada konferensi Oslo 1984 (sinungan, 2009), produktivitas semesta adalah suatu konsep yang bersifat universal yang bertujuan untuk menyediakan lebih banyak barang dan jasa untuk lebih banyak manusia, dengan menggunakan sumber-sumber riil yang makin sedikit.

Produktivitas (Raeni, 2014) adalah ukuran kinerja ekonomi. Konsep produktivitas kerja menurut Sutikno (2009) dapat dilihat dari dua dimensi, yaitu dimensi individu dan dimensi organisasi. Dimensi individu melihat produktivitas dalam kaitannya dengan karakteristik-karakteristik kepribadian individu yang muncul dalam bentuk sikap mental dan mengandung makna keinginan dan upaya individu yang selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas kehidupannya. Sedangkan dimensi keorganisasian melihat produktivitas dalam kerangka hubungan teknis antara masukan (*input*) dan keluaran (*output*). Sedangkan Thomas (1971:57) dalam Raeni (2014) menyebutkan bahwa, pencapaian tujuan

berdasarkan analisis *output* dan *input* serta hubungan di antara keduanya. Input ini dijabarkan dari waktu siswa, waktu guru, sarana prasarana, materi ataupun buku, dan kondisi lingkungan. Sedangkan *output* tersebut dijabarkan sebagai *value added* atau nilai tambah. Pada perusahaan nilai tambah bertujuan kepada profit, akan tetapi pada bidang pendidikan, nilai tambah didefinisikan sebagai tambahan ilmu pengetahuan yang didapatkan dari setiap proses pembelajaran. Ilmu pengetahuan tersebut tidak hanya berdampak pada ranah kognitif tetapi meliputi kognitif, afektif, psikomotorik.

Sinungan (2009) menyebutkan bahwa pengukuran produktivitas terutama digunakan sebagai sarana manajemen untuk menganalisa dan mendorong efisiensi produk. Manfaat dari pengukuran produktivitas; (1) dengan pemberitahuan awal, instalasi dan pelaksanaan suatu sistem pengukuran, akan meninggikan kesadaran pegawai dan minatnya pada tingkat dan rangkaian produktivitas, (2) diskusi tentang gambaran-gambaran yang berasal dari metode-metode yang relatif kasar ataupun dari data yang kurang memenuhi syarat sekalipun, ternyata memberi dasar bagi penganalisaan proses yang konstruktif atas produktif.

Produktivitas kerja mengandung makna; (1) sumber daya atau potensi individu (*input*); dan (2) hasil yang dicapai (*output*). Produktivitas kerja adalah potensi atau daya yang dihasilkan oleh individu yang digunakan secara maksimal untuk mencapai keluaran (*output*) yang lebih, kreatif, generatif, dan menghasilkan keuntungan atau kebermanfaatan (Sutikno, 2009). Raeni (2014) menjelaskan, sekolah dapat dikatakan produktif apabila tingkat *output*nya dapat meningkat dengan *input* yang sama. Jadi, produktivitas sekolah adalah tingkat pencapaian

yang dihasilkan dari setiap *input* yang dikeluarkan sehingga dapat diukur efektivitas maupun efisiensi dari suatu proses pendidikan.

2.1.2 Faktor yang Mempengaruhi Produktivitas

Produktivitas sekolah dipengaruhi oleh beberapa faktor. Khaparde (2004:243) dalam Raeni (2014) menyatakan bahwa faktor yang berpengaruh terhadap kesuksesan sekolah adalah sebagai berikut:

1. Sistem manajemen yang partisipatif dalam menjalankan aktivitas sehari-hari di sekolah.
2. Menggunakan prinsip demokrasi dalam pengambilan keputusan.
3. Memberikan kepercayaan kepada masing-masing warga sekolah untuk melaksanakan masing-masing tugas secara akuntabel.
4. Membangun hubungan baik dengan orang tua murid, sesama guru.
5. Melaksanakan pembelajaran yang inovatif dan mengevaluasi setiap keputusan yang diambil

Selain itu, Thomas (2013) mengemukakan terdapat enam faktor yang mempengaruhi produktivitas Sekolah. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mutu proses

Mutu proses mempunyai beberapa indikator yaitu mutu dari data informasi, mutu pembelajaran, mutu kurikulum, mutu sumber daya. Era globalisasi proses pembelajaran berkaitan erat dengan teknologi informasi komunikasi.

Oleh karena itu mutu proses pembelajaran juga menggunakan sarana prasarana sesuai dengan perkembangan zaman.

2. Kompetensi guru

Kompetensi guru memiliki empat kompetensi pokok yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi profesional. Keempat kompetensi ini wajib dimiliki guru agar menjadi guru yang kompeten.

3. Budaya organisasi

Budaya organisasi merupakan serangkaian bentuk kepercayaan, perilaku, adat, dan sikap yang membantu anggota organisasi memahami prinsip-prinsip yang dianutnya, bagaimana organisasi melakukan berbagai hal, dan apa yang dianggap penting oleh organisasi. Indikator dari budaya organisasi meliputi inovasi, perhatian terhadap detail, orientasi pada manusia, orientasi pada *team*, dan agresivitas.

4. Pembiayaan

Kecukupan pembiayaan akan menggairahkan guru dalam mengajar sehingga siswa dalam belajar juga bergairah. Mutu proses akan berjalan dengan baik dan *output* serta *outcome* akan mengikutinya. Pembiayaan mempunyai indikator yaitu variasi sumber, alokasi dana, kecukupan dana dan prinsip pengelolaan dana. Prinsip pengelolaan dana pendidikan sesuai dengan PP No. 48 Tahun 2008 meliputi prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, akuntabilitas publik dan prinsip khusus.

5. Kepemimpinan kepala sekolah

Kepala sekolah merupakan motor penggerak, penentu kebijakan sekolah, penentu target dan tujuan sekolah dapat direalisasikan. Fungsi dari kepala sekolah adalah sebagai edukator, *manager*, *administrator*, *supervisor*, *leader*, wirausaha, dan *climate maker*.

6. Peran komite sekolah

Komite sekolah mempunyai peranan penting dalam sekolah. Keberadaan komite sekolah memiliki fungsi sebagai badan pertimbangan, badan pendukung, badan pengontrol, dan badan penghubung.

2.1.3 Indikator Produktivitas

Pengukuran produktivitas menyangkut permasalahan yang kompleks dan interdisipliner. Faktor-faktor mendasar yang mempengaruhi pencapaian produktivitas adalah oleh posisi investasi, baik modal, teknologi, manajemen, serta keterampilan dari tenaga kerja (Sinungan, 2009). Faktor manajemen (Sutikno, 2009) meliputi cara dan proses menggerakkan orang lain untuk tujuan tertentu. Sedang faktor keterampilan tenaga kerja menyangkut kemampuan yang dimiliki oleh tenaga kerja, motivasi kerja, disiplin, etos kerja serta hubungan antarpersonal. Menurut Thomas (2013) indikator produktivitas meliputi:

1. Keefektifan
2. Efisiensi internal
3. Efisiensi eksternal
4. Mutu lulusan

2.2 Anggaran Pendidikan

2.2.1 Definisi Anggaran Pendidikan

Salah satu faktor yang mempengaruhi produktivitas sekolah menurut Thomas (2013) adalah pembiayaan. Di dalam organisasi sekolah, pembiayaan kegiatan menggunakan anggaran yang tertuang dalam APBS. Anggaran sendiri menurut Mardiasmo (2002) berisi rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Dalam bentuk yang paling sederhana, anggaran merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas. Penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter.

Anggaran adalah biaya yang dipersiapkan dengan suatu rencana terperinci. Secara lebih khusus dapat dikatakan bahwa anggaran adalah rencana yang disusun secara terorganisasikan untuk menerima dan mengeluarkan dana bagi suatu periode tertentu. Sedangkan anggaran pendidikan adalah alokasi anggaran pada fungsi pendidikan yang dianggarkan melalui kementerian negara/lembaga dan alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah, termasuk gaji pendidik, namun tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan, untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-VI I 2008, pemerintah harus menyediakan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari

APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

2.2.2 Sumber Anggaran Pendidikan

Pembiayaan pendidikan, baik pada tataran mikro maupun makro, dikenal beberapa kategori biaya. Pertama, biaya langsung, adalah segala pengeluaran yang secara langsung menunjang penyelenggaraan pendidikan, dan biaya tidak langsung yakni biaya berasal dari pengeluaran tidak langsung menunjang proses pendidikan misalnya: biaya hidup siswa, biaya transportasi ke sekolah, dan lain sebagainya. Kedua, biaya pribadi yaitu biaya yang dikeluarkan oleh keluarga untuk pendidikan keluarga atau dikenal juga pengeluaran rumah tangga. Lalu, ada juga biaya sosial yakni biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk pendidikan, baik melalui sekolah maupun melalui pajak yang dihimpun oleh pemerintah kemudian digunakan untuk membiayai pendidikan. Ketiga, biaya dalam bentuk uang dan bukan uang (Supriadi, 2003).

Dilihat dari sumber-sumbernya, biaya pendidikan pada tingkat makro (nasional) berasal dari:

1. Pendapatan negara dari sektor pajak.
2. Pendapatan dari sektor non-pajak, misalnya dari pemanfaatan sumber daya alam dan produksi nasional lainnya yang lazim dikategorikan ke dalam “gas” dan “non-migas”.
3. Keuntungan dari ekspor barang dan jasa.

4. Usaha-usaha negara lainnya, termasuk dari divestasi saham pada perusahaan negara (BUMN).
5. Bantuan dalam bentuk hibah dan pinjaman dari luar negeri baik dari lembaga keuangan internasional (Bank Dunia, ADB, IMF, IDB, JICA) maupun pemerintah, baik melalui kerjasama multilateral maupun bilateral.

2.2.3 Bantuan Operasional Sekolah

Sekarang ini pemerintah sudah mengupayakan peningkatan pembiayaan pendidikan dengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Menurut PP 48 tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan, Biaya non personalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak dll. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS.

Secara umum program dana BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Sedangkan secara khusus program dana BOS bertujuan untuk:

1. Membebaskan pungutan bagi seluruh siswa SD/ SDLB negeri dan SMP/ SMPLB/ SMPT (Terbuka) negeri terhadap biaya operasi sekolah, kecuali pada Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan Sekolah Bertaraf

Internasional (SBI). Sumbangan/ pungutan bagi sekolah RSBI dan SBI harus tetap mempertimbangkan fungsi pendidikan sebagai kegiatan nirlaba, sehingga sumbangan/ pungutan tidak boleh berlebih;

2. Membebaskan pungutan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta;
3. Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi siswa di sekolah swasta.

2.2.4 Manajemen Anggaran Pendidikan

Anggaran disamping sebagai alat untuk perencanaan dan pengendalian, juga merupakan alat bantu bagi manajemen dalam mengarahkan suatu lembaga menempatkan organisasi dalam posisi yang kuat atau lemah. Oleh karena itu, anggaran juga dapat berfungsi sebagai tolak ukur keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Di samping itu, anggaran dapat pula dijadikan alat untuk mempengaruhi dan memotivasi pimpinan atau manajer dan karyawan untuk bertindak efisien dalam mencapai sasaran-sasaran lembaga.

Apabila melihat perkembangannya, anggaran mempunyai manfaat yang dapat digolongkan ke dalam tiga jenis yaitu: sebagai alat penaksir, sebagai alat otorisasi pengeluaran dana, dan sebagai alat efisiensi

Apabila anggaran menghendaki fungsi sebagai alat dalam perencanaan maupun pengendalian, maka anggaran harus disusun berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut.

1. Adanya pembagian wewenang dan tanggung jawab yang jelas dalam sistem manajemen dan organisasi.

2. Adanya sistem akuntansi yang memadai dalam melaksanakan anggaran.
3. Adanya penelitian dan analisis untuk menilai kinerja organisasi.
4. Adanya dukungan dari pelaksana mulai dari tingkat atas sampai yang paling bawah.

Ada empat hal yang perlu digaris bawahi terkait dengan manajemen keuangan sekolah (Wijaya, 2009), antara lain sebagai berikut:

1. Manajemen keuangan merupakan keseluruhan proses upaya memperoleh serta mendayagunakan seluruh daya.
2. Mencari sebanyak mungkin sumber-sumber keuangan serta berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan dana dari sumber-sumber tersebut.
3. Menggunakan seluruh dana yang tersedia atau diperoleh semata-mata untuk penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Pada pasal 62 PP nomor 19 tahun 2005, pembiayaan pendidikan terdiri dari: (1) biaya investasi, yang meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan SDM, dan modal kerja tetap; (2) biaya personal, yang meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik agar dapat mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan; (3) biaya operasi, yang meliputi gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta tunjangan yang melekat pada gaji; bahan atau peralatan pendidikan habis pakai; serta biaya operasi pendidikan tak langsung berupa air, pemeliharaan sarana dan prasarana, pajak, jasa telekomunikasi, dan lain sebagainya.
4. Penggunaan seluruh dana sekolah harus dilakukan secara efektif dan efisien. Selain itu, penggunaan seluruh dana sekolah harus dilakukan dengan tertib

dan mudah dipertanggungjawabkan kepada semua pihak yang terkait. Pelaksanaan kegiatan penggunaan dana harus mengacu kepada RAPBS yang telah ditetapkan. Pembukuan uang masuk dan keluar harus dilakukan secara teliti dan transparan.

2.3 Penyelenggaraan Pendidikan

2.3.1 Definisi Penyelenggaraan Pendidikan

UU no. 20 tahun 2003 menjabarkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan meliputi:

1. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
2. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.
3. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.

4. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
5. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.
6. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

2.3.2 Good Governance

World Bank mendefinisikan *good governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Sedangkan menurut *United Nations Development Program* (UNDP), tata pemerintahan adalah penggunaan wewenang ekonomi politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka.

Karakteristik *Good governance* menurut UNDP (Mardiasmo, 2002) meliputi:

1. *Participation*, yaitu keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan.
2. *Rule of law*, yaitu kerangka hukum yang adil dan tanpa pandang bulu.
3. *Transparency*, yaitu kebebasan mendapatkan informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik.
4. *Responsiveness*, yaitu kecepatan dan daya tanggap lembaga publik dalam memberikan layanan kepada *stakeholder*.
5. *Consensus Orientation*, yaitu berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.
6. *Equity*, yaitu setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan.
7. *Efficiency and Effektivness*, yaitu pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna.
8. *Accountability*, yaitu pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.
9. *Strategic vision*, yaitu penyelenggara pemerintahan dan masyarakat harus memiliki visi jauh kedepan.

Dari karakteristik tersebut di atas, setidaknya terdapat tiga hal yang dapat memperbaiki pengelolaan anggaran di sekolah, yaitu penciptaan transparansi, akuntabilitas publik dan *value for money* (*economy, efficiency, dan effectiveness*).

2.3.3 Sekolah Bermutu Terpadu

Transformasi menuju sekolah bermutu terpadu (Arcaro, 2005) diawali dengan mengadopsi dedikasi bersama terhadap mutu oleh dewan sekolah, administrator, staf, siswa, guru dan komunitas. Prosesnya diawali dengan mengembangkan visi dan misi mutu untuk wilayah dan setiap sekolah serta departemen dalam wilayah tersebut. Visi mutu diutamakan kepada:

1. Terfokus kepada konsumen.

Agar sekolah mengembangkan fokus mutu, setiap orang dalam sistem sekolah mesti mengakui bahwa setiap *output* lembaga pendidikan adalah konsumen.

2. Keterlibatan total.

Manajemen mesti memiliki komitmen untuk memfokuskan pada mutu. Tanpa adanya komitmen, program mutu tidak akan berhasil. Ada dua keyakinan pokok yang menghalangi tiap upaya penciptaan mutu dalam sistem pendidikan. Pertama, banyak profesional pendidikan yakin bahwa mutu pendidikan bergantung kepada besarnya dana, padahal keyakinan itu salah. Kedua, banyak profesional pendidikan yang tetap memandang pendidikan sebagai sebuah “jaringan anak manis”. Mereka bersikukuh untuk bertahan dari tarikan profesional nonpendidikan yang mempengaruhi perubahan sistem.

3. Pengukuran

Para profesional pendidikan perlu mengumpulkan dan menganalisis data supaya pengukuran mutu dapat maksimal.

4. Memandang pendidikan sebagai sistem

Pendidikan mesti dipandang sebagai suatu sistem. Hanya dengan memandang pendidikan sebagai sebuah sistem maka para profesional pendidik dapat mengeleminasi pemborosan dari pendidikan dan dapat memperbaiki mutu setiap proses pendidikan.

5. Perbaikan berkelanjutan

Konsep dasarnya, mutu adalah segala sesuatu yang dapat diperbaiki. Menurut filosofi manajemen yang baru, “Bila tidak rusak, perbaikilah, karena bila anda tidak melakukannya, orang lain pasti akan melakukannya.” Inilah konsep perbaikan berkelanjutan.

Dr. W Edward Deming mengembangkan 14 perkara yang menggambarkan apa yang dibutuhkan sebuah kegiatan untuk mengembangkan budaya mutu, butir-butir tersebut dinamakan “Hakikat Mutu dalam Pendidikan”.

1. Menciptakan konsistensi tujuan.

Menciptakan konsistensi tujuan untuk memperbaiki layanan dan siswa, dimaksudkan untuk menjadikan sekolah sebagai sekolah yang kompetitif dan berkelas dunia.

2. Mengadopsi filosofi mutu total.

Sistem sekolah mesti menyambut baik tantangan untuk berkompetisi dalam sebuah perekonomian global. Setiap anggota sistem sekolah mesti belajar keterampilan baru untuk mendukung revolusi mutu. Orang mesti bertanggung jawab untuk memperbaiki mutu. Setiap orang mesti belajar menjalankan pekerjaannya secara efisien dan produktif.

3. Mengurangi kebutuhan pengujian.

Mengurangi kebutuhan pengujian dan inspeksi yang berbasis produksi massal dilakukan dengan membangun mutu dalam layanan pendidikan. Memberikan lingkungan belajar yang menghasilkan kinerja siswa yang bermutu.

4. Menilai bisnis sekolah dengan cara baru.

Nilailah bisnis sekolah dengan meminimalkan biaya total pendidikan. Pandanglah sekolah sebagai pemasok siswa dari kelas satu sampai kelas-kelas selanjutnya. Bekerja bersama para orang tua siswa dan berbagai lembaga untuk memperbaiki mutu siswa menjadi bagian dari sistem.

5. Memperbaiki mutu dan produktivitas serta mengurangi biaya.

Dengan melembagakan proses “Rencanakan/periksa/ubah”. Gambarkan proses untuk memperbaiki, mengidentifikasi mata rantai konsumen/pemasok, mengidentifikasi bidang-bidang perbaikan; implementasikan perubahan, nilai dan ukur hasilnya, dan dokumentasikan serta standarisasi proses. Ulangi siklusnya dari awal lagi untuk mencapai standar yang lebih tinggi.

6. Belajar sepanjang hayat.

Mutu diawali dan diakhiri dengan latihan. Pelatihan memberikan perangkat yang dibutuhkan untuk memperbaiki proses kerja.

7. Kepemimpinan dalam pendidikan.

Merupakan tanggung jawab manajemen untuk memberikan arahan. Para manajer dalam pendidikan mesti mengembangkan visi dan misi untuk

wilayah, sekolah atau jurusannya. Mutu harus terintegrasikan ke dalam pernyataan visi dan misi.

8. Mengeleminasi rasa takut.

Lenyapkanlah bekerja karena dorongan rasa takut. Ciptakanlah lingkungan yang akan mendorong orang untuk bebas bicara. Maka setiap orang akan bekerja secara efektif untuk perbaikan sekolah.

9. Mengeliminasi hambatan keberhasilan.

Manajemen bertanggung jawab untuk menghilangkan hambatan yang menghalangi orang mencapai keberhasilan dalam menjalankan pekerjaannya. Mengembangkan strategi-strategi gerakan: gerakan dari kompetisi menjadi kolaborasi dengan kelompok lain; gerakan dari mengisolasi pemecahan masalah menjadi bersama-sama menjadi berbagi informasi; gerakan dari bertahan dari perubahan menjadi menyambut baik perubahan.

10. Menciptakan budaya mutu.

Ciptakanlah budaya mutu. Jangan biarkan gerakan menjadi seseorang atau sekelompok orang. Ciptakanlah budaya mutu yang mengembangkan tanggung jawab pada setiap orang.

11. Perbaiki proses.

Tidak ada proses yang pernah sempurna; karena itu, carilah cara terbaik, proses terbaik, terapkan tanpa pandang bulu. Menemukan solusi harus didahulukan, dan bukan mencari-cari masalah.

12. Membantu siswa berhasil.

Hilangkan rintangan yang merampok hak siswa, guru atau administrator untuk memiliki rasa bangga pada hasil karyanya. Tanggung jawab semua administrator pendidikan mesti diubah dari kuantitas menjadi kualitas.

13. Komitmen.

Manajemen mesti memiliki komitmen terhadap budaya mutu, serta berkemauan untuk mendukung dan memperkenalkan cara baru dalam mengerjakan sesuatu ke dalam sistem pendidikan.

14. Tanggung jawab.

Biarkanlah setiap orang di sekolah untuk bekerja menyelesaikan transformasi mutu. Transformasi merupakan tugas setiap orang.

2.4 Prinsip Keadilan

2.4.1 Pengertian Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan menurut PP No. 48 Tahun 2008 merupakan pemberian akses pelayanan pendidikan yang seluas-luasnya dan merata kepada peserta didik atau calon peserta didik, tanpa membedakan latar belakang suku, ras, agama, jenis kelamin, dan kemampuan atau status sosial-ekonomi. Prinsip keadilan dalam pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 50 bab V PP 48 tahun 2008 berarti bahwa besarnya pendanaan pendidikan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.

Sedangkan Raeni (2014) menyimpulkan, prinsip keadilan merupakan landasan dalam pengelola keuangan sekolah yang mendasari penerimaan dan alokasi keuangan sekolah serta akses pelayanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing komponen di sekolah. Komponen tersebut meliputi, siswa, guru, karyawan sekolah, dan sarana yang menunjang pencapaian tujuan dari sekolah.

2.4.2 Tujuan Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan merupakan pemberian akses pelayanan pendidikan yang seluas-luasnya dan merata kepada peserta didik atau calon peserta didik, tanpa membedakan latar belakang suku, ras, agama, jenis kelamin, dan kemampuan atau status sosial-ekonomi.

Dalam aplikasinya, prinsip keadilan tertuang dalam petunjuk teknik pengelolaan BOS. Dalam petunjuk teknik tersebut diungkapkan bahwa pemerintah memberikan bantuan pembiayaan pendidikan menengah, baik untuk guru maupun siswa. Bantuan tersebut berupa biaya pendidikan tersebut meliputi: (a) Biaya Investasi Sekolah (Pengelolaan Pendidikan), (b) Biaya Operasional Sekolah (Biaya di Satuan Pendidikan), dan (c) Biaya Pribadi Peserta Didik.

2.4.3 Indikator Prinsip keadilan

Adam Smith mengungkapkan bahwa Keadilan sesungguhnya hanya punya satu arti, yaitu keadilan komutatif yang menyangkut kesetaraan, keseimbangan, keharmonisan hubungan antara satu orang dengan orang lain. Ketidakadilan

berarti pincangnya hubungan antarmanusia karena kesetaraan yang terganggu. Bappenas (2007:19) dalam Raeni (2014) menyebutkan indikator keadilan adalah sebagai berikut:

1. Adanya kebijakan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat secara seimbang (subsidi silang, *affirmative action*).
2. Tersedianya layanan-layanan/fasilitas khusus bagi masyarakat kurang mampu.
3. Adanya pemberdayaan kawasan tertinggal.

Berdasarkan beberapa rumusan indikator yang telah dikemukakan di atas, indikator prinsip keadilan yang peneliti sesuaikan dengan pengelolaan anggaran sekolah adalah sebagai berikut:

1. Adanya kebijakan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat secara seimbang.
2. Tersedianya layanan-layanan/fasilitas khusus bagi masyarakat kurang mampu.
(Bappenas 2007)

2.4.4 Indikator keberhasilan Prinsip Keadilan

Dalam PP no. 17 tahun 2010 diterangkan bahwa standar pelayanan minimal bidang pendidikan untuk pemerintah daerah merupakan syarat awal yang harus dipenuhi untuk menyelenggarakan atau memfasilitasi penyelenggaraan satuan pendidikan sesuai standar nasional pendidikan secara bertahap. Dengan prinsip keadilan, maka tujuan dari penyelenggaraan satuan pendidikan sesuai standar nasional pendidikan akan terwujud.

Adapun keberhasilan prinsip keadilan dapat dilihat dari:

- 1 Semua orang berhak memperoleh pendidikan yang layak tanpa terkecuali.
- 2 Masyarakat kurang mampu memperoleh layanan-layanan/ fasilitas khusus untuk memperoleh pendidikan.

2.5 Transparansi

2.5.1 Pengertian Transparansi

Prinsip transparansi pengelolaan pendidikan menurut PP No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan merupakan prinsip yang dilakukan dengan memenuhi asas kepatutan dan tata kelola yang baik oleh pemerintah, pemerintah daerah, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan. Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Bentuk transparansi (Nandiarossa, 2013) yaitu:

1. Penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur, biaya, dan tanggung jawab.
2. Kemudahan akses informasi.
3. Menyusun suatu mekanisme pengaduan.
4. Meningkatkan arus informasi.

Dalam hal ini, sekolah perlu menggunakan berbagai macam media komunikasi seperti melalui brosur, leaflet, pengumuman melalui koran, radio serta televisi lokal.

2.5.2 Tujuan Transparansi

Transparansi apabila ditinjau dari institusi pendidikan, dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi dimana setiap orang yang terkait dengan pendidikan (*stakeholder*), mengetahui dan terlibat aktif dalam pengelolaan sumber daya dan pengambilan kebijakan sekolah (Raeni, 2014). Beberapa tujuan transparansi dalam sekolah antara lain:

1. Untuk membangun kepercayaan dan keyakinan kepada sekolah bahwa sekolah merupakan organisasi pelayanan pendidikan yang bersih, bersih dalam arti tidak korupsi, kolusi dan nepotisme.
2. Untuk menciptakan kepercayaan timbal balik antara sekolah dan masyarakat melalui informasi yang memadai dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat.
3. Untuk menyediakan informasi keuangan yang terbuka bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good governance*).

2.5.3 Indikator Transparansi

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai (Krina, 2003 dalam Raeni, 2014). Transparansi sekolah ditunjukkan oleh indikator sebagai berikut:

1. Keterbukaan kebijakan anggaran sekolah.
2. Keterbukaan laporan pertanggung jawaban.
3. Adanya akses pada informasi yang siap, mudah dijangkau, bebas diperoleh, dan tepat waktu.

(Sutedjo, 2009)

2.5.4 Indikator keberhasilan transparansi

Menurut Hamid Muhammad (2007) dalam Sutedjo (2009) bahwa keberhasilan transparansi sekolah ditunjukkan oleh indikator sebagai berikut:

1. Meningkatnya keyakinan dan kepercayaan publik kepada sekolah bahwa sekolah adalah bersih dan berwibawa.
2. Meningkatnya partisipasi publik dalam penyelenggaraan sekolah.
3. Bertambahnya wawasan dan pengetahuan publik terhadap penyelenggaraan sekolah.
4. Berkurangnya pelanggaran terhadap peraturan perundang- undangan yang berlaku.

2.6 Akuntabilitas

2.6.1 Pengertian akuntabilitas

Pasal 7 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Asas Akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu seseorang yang mendapatkan amanat harus mempertanggungjawabkannya kepada orang-orang yang memberinya kepercayaan. Mardiasmo (2002) mengartikan akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut sebagai berikut:

1. Keputusan harus dibuat secara tertulis dan tersedia bagi setiap warga yang membutuhkan.
2. Membuat suatu keputusan, setiap keputusan sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku, sesuai prinsip administrasi yang benar.
3. Akurasi dan kelengkapan informasi.
4. Penjelasan sasaran kebijakan yang diambil dan dikomunikasikan.
5. Kelayakan dan konsistensi.
6. Penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan.

2.6.2 Tujuan Akuntabilitas

Menurut Turner dan Hulme (1997) dalam Mardiasmo (2002), akuntabilitas merupakan konsep yang kompleks dan lebih sulit mewujudkannya daripada memberantas korupsi. Adapun tujuan akuntabilitas menurut Nandiarossa (2013) adalah:

- 1 Untuk menciptakan kepercayaan publik terhadap sekolah.
- 2 Untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja sekolah sebagai salah satu syarat untuk terciptanya sekolah yang baik dan terpercaya.
- 3 Untuk menilai kinerja sekolah dan kepuasan publik terhadap pelayanan pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah.

2.6.3 Indikator Akuntabilitas

Akuntabilitas sangat penting untuk mempertanggung jawabkan setiap program/kebijakan baik secara proses atau hasilnya. Di sisi lain, partisipasi pimpinan dan masyarakat sebagai pemangku kepentingan, diperlukan untuk menciptakan akuntabilitas dalam penyusunan dan pengawasan anggaran. Indikator akuntabilitas meliputi:

- 1 Sekolah melaksanakan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dalam membuat laporan keuangan
- 2 adanya pelaporan keuangan secara periodik
- 3 Keterlibatan semua pihak dalam penyusunan RAPBS.

(Boy dan Siringoringo, 2009)

2.6.4 Indikator Keberhasilan Akuntabilitas

Nandiarossa (2013) menyebutkan untuk mengukur berhasil tidaknya akuntabilitas dalam manajemen berbasis sekolah, dapat dilihat pada beberapa indikator, sebagai berikut :

1. Meningkatnya kepercayaan dan kepuasan publik terhadap sekolah.
2. Tumbuhnya kesadaran publik tentang hak untuk menilai terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah.
3. Meningkatnya kesesuaian kegiatan- kegiatan sekolah dengan nilai dan norma yang berkembang di masyarakat.
4. Berkurangnya kasus- kasus Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) di sekolah.

Keempat indikator di atas dapat dipakai oleh sekolah untuk mengukur akuntabilitas sekolah telah mencapai hasil yang diinginkan. Tidak saja publik merasa puas, tetapi sekolah akan mengalami peningkatan dalam berbagai macam hal.

2.7 Kerangka Berpikir

Tidak ada titik jenuh dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja dalam organisasi, terlepas dari tujuan, misi, jenis, struktur, dan ukurannya. Sekolah sebagai suatu organisasi juga selalu dapat ditingkatkan produktivitasnya, baik pada tingkat individual, kelompok, maupun pada tingkat institusi sekolah secara keseluruhan. Menurut Sinungan (2009) produktivitas diperoleh melalui berbagai perbaikan cara kerja, pemborosan waktu, tenaga dan berbagai input lainnya akan bisa dikurangi sejauh mungkin. Dengan begitu, tenaga dapat dikerahkan secara efektif dan pencapaian tujuan usaha terselenggara dengan baik, efektif dan efisien.

Memang, peningkatan produktivitas sekolah akan meningkatkan mutu sekolah itu sendiri dan harus diakui kalau hal tersebut tidak bisa terlepas dari pendanaan yang besar. Sarana dan prasarana pendidikan (gedung, perpustakaan

dsb.) yang memadai, kualitas guru, dan tersedianya laboratorium sekolah dan fasilitas lainnya sangat berpengaruh bagi penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Akan tetapi persoalan manajemen pendidikan juga menjadi persoalan mendasar yang perlu dibenahi, bahkan perlu dilakukan reformasi sistemik karena dalam pengelolaannya masih kurang efektif dan efisien. Reformasi pendidikan menjadi alternatif untuk mewujudkan cita-cita pendidikan yang ideal.

Salah satu upaya untuk mewujudkan cita-cita pendidikan yang ideal dapat melalui tata kelola yang baik (*good governance*). *Good governance* pada intinya adalah mengenai suatu sistem, proses, dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). *Good governance* dimaksudkan untuk mengatur hubungan ini dan mencegah terjadinya kesalahan (*mistakes*) signifikan dalam strategi korporasi dan untuk memastikan bahwa kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki dengan segera.

Menurut penelitian Suti yang berjudul “Strategi Peningkatan Mutu di Era Otonomi Pendidikan” ada beberapa upaya yang perlu dilakukan dalam mengelola institusi untuk peningkatan pendidikan, yakni: upaya pemberdayaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan dengan berpedoman kepada 8 tema dan prinsip *good governance* yang menjadi kaidah yang normatif untuk merealisasikan seluruh program desentralisasi dan otonomi daerah khususnya bidang pendidikan, upaya penerapan aspek efisiensi internal pendidikan dengan fokus: *input*, proses dan *output*, upaya penerapan aspek eksternal pendidikan dengan memperhatikan faktor manfaat dan dampak dari hasil pendidikan, upaya merealisasikan komponen dan prinsip-prinsip yang terkait dengan peningkatan

mutu pendidikan, upaya memperhatikan pendekatan-pendekatan dalam peningkatan mutu pendidikan.

Siringoringo dan Boy dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) Terhadap partisipasi Orang Tua Murid” mengungkapkan bahwa sikap akuntabel dan transparan satuan pendidikan dalam pengelolaan APBS jika dilakukan baik secara simultan maupun parsial berpengaruh dan signifikan terhadap partisipasi orang tua murid. Semakin akurat dan tepat waktu pelaporan penggunaan dana yang dikumpulkan dari orang tua murid, maka akan semakin tinggi partisipasi orang tua murid dalam pembiayaan pendidikan.

Dari kesimpulan penelitian Kurniadi yang berjudul “Pengolaan Pembiayaan Sekolah Dasar di Kabupaten Bandung” pembiayaan pendidikan pada sekolah dasar di Kabupaten Bandung, diarahkan kepada pendidikan yang dapat membantu mengembangkan potensi kemandirian setiap peserta didik dengan didukung oleh kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik untuk memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Strategi pembiayaan yang dapat diterapkan untuk melaksanakan proses pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, harus memfokuskan pada program-program yang terjadi pada objek biaya, supaya efisiensi pembiayaan pendidikan dapat tercapai, sehingga mutu pendidikan tersebut menjadi lebih baik.

Menurut Wijaya (2009) manajemen keuangan sekolah merupakan salah satu alat penentu terwujudnya mutu pendidikan. Pendidikan yang mahal bukan secara otomatis menunjukkan mutu pendidikan yang tinggi, karena tinggi dan

rendahnya biaya pendidikan ditentukan oleh manajemen keuangan sekolah. Oleh karena itu, setiap sekolah seharusnya menerapkan manajemen keuangan sekolah berbasis akuntansi yang sesuai dengan standar akuntansi dan keuangan yang berlaku secara umum serta sistem manajemen keuangan berbasis pada produktivitas sekolah.

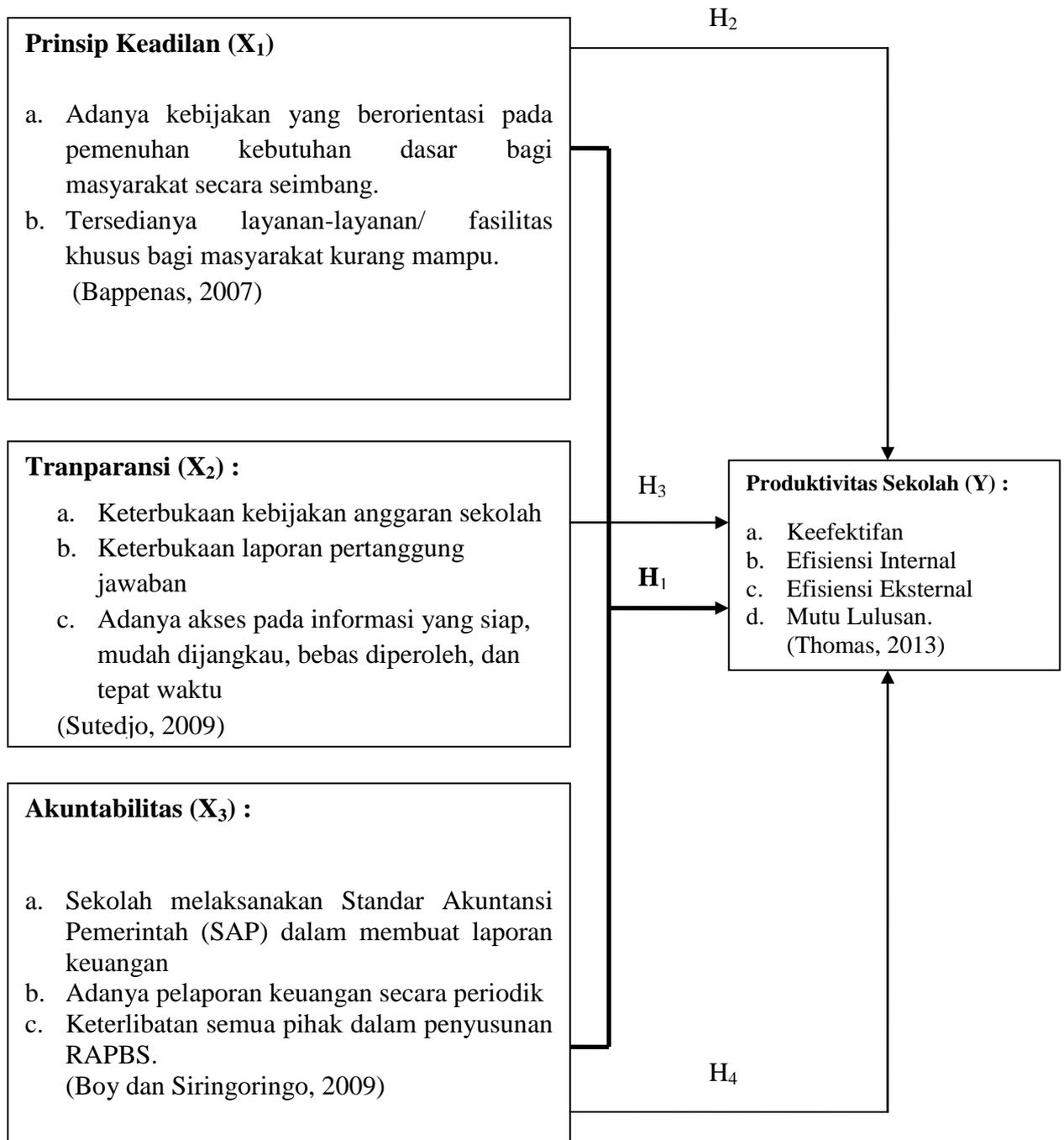
Dalam PP no 48 tahun 2008 pasal 50 dijelaskan bahwa sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan. Prinsip keadilan berarti bahwa besarnya pendanaan pendidikan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Prinsip kecukupan berarti bahwa pendanaan pendidikan cukup untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan. Prinsip keberlanjutan berarti bahwa pendanaan pendidikan dapat digunakan secara berkesinambungan untuk memberikan layanan pendidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan.

Dari hasil observasi, tingkat transparansi penggunaan anggaran SMP N 3 Mertoyudan Kabupaten Magelang masih belum teruji. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara yang ada bahwa sekolah hanya membeberkan hasil penggunaan dana mereka kepada pihak terkait misalnya Badan Pemeriksa Keuangan dan Dinas pendidikan, tidak kepada masyarakat secara umum. Padahal dengan adanya keterbukaan dari pihak sekolah, kepercayaan masyarakat kepada sekolah tersebut juga akan semakin meningkat.

Akuntabilitas merupakan salah satu pokok penting dalam *good governance*. Akuntabilitas pengelolaan keuangan sekolah menggambarkan

kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan pengelolaan keuangan sekolah. Dengan menggunakan prinsip akuntabilitas, penciptaan pengelolaan anggaran yang bersifat efisien dapat tercapai dengan baik. Namun, karena tingkat transparansi SMP N 3 Mertoyudan Magelang masih belum teruji, dapat diindikasikan bahwa akuntabilitas sekolah tersebut juga belum dapat dikatakan tinggi. Rendahnya tingkat akuntabilitas menyebabkan rawan tindak pidana korupsi yang dewasa ini telah “menggerogoti” hampir setiap institusi pemerintahan.

Uraian di atas mendasari peneliti untuk meneliti lebih lanjut terkait dengan pengaruh prinsip keadilan, transparansi, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan terhadap produktivitas sekolah, dalam hal ini SMP N 3 Mertoyudan sebagai objek penelitian karena memiliki keluaran prestasi terendah di kecamatan Mertoyudan kabupaten Magelang. Hasil penelitian ini akan memberikan gambaran tentang pengelolaan keuangan sekolah tersebut sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan sekolah bagi *stakeholders* di bidang pendidikan.



2.1. Gambar Kerangka Berpikir

2.8 Hipotesis Penelitian

Hipotesis dapat diartikan sebagai sebuah jawaban yang bersifat sementara yang kebenarannya masih perlu diuji, peneliti perlu mengumpulkan data-data yang paling berguna untuk membuktikan hipotesis (Suharsimi, 2010:110). Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka hipotesis yang diajukan oleh peneliti adalah :

H₁ : Terdapat pengaruh prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan anggaran terhadap produktivitas sekolah.

H₂ : Terdapat pengaruh prinsip keadilan pengelolaan anggaran terhadap produktivitas sekolah.

H₃ : Terdapat pengaruh transparansi pengelolaan anggaran terhadap produktivitas sekolah.

H₄ : Terdapat pengaruh akuntabilitas pengelolaan anggaran terhadap produktivitas sekolah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2010:14) Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada sifat positivisme. Penelitian ini digunakan untuk meneliti pada populasi dan sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random. Pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, dan analisis data bersifat statistik atau kuantitatif dengan tujuan menguji hipotesis yang ditentukan.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek / subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono,2010:117). Populasi dalam penelitian ini berjumlah 31 orang dan kesemuanya adalah guru SMP N 3 Mertoyudan yang akan diberi pertanyaan mengenai persepsi mereka tentang variabel produktivitas, prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas.

Teknik *sampling* yang digunakan adalah *sampling* jenuh atau biasa disebut dengan istilah sensus. *Sampling* jenuh merupakan teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2010:124).

3.3 Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel penelitian yaitu variabel terikat (Y) dan variabel bebas (X):

1. Variabel Terikat (Y)

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah produktivitas sekolah. produktivitas sekolah adalah tingkat pencapaian yang dihasilkan dari setiap *input* yang dikeluarkan sehingga dapat diukur efektivitas maupun efisiensi dari suatu proses pendidikan. Adapun Indikator dari produktivitas sekolah adalah sebagai berikut :

- a. Keefektifan
- b. Efisiensi Internal
- c. Efisiensi Eksternal
- d. Mutu Lulusan.

(Thomas, 2013)

2. Variabel Bebas

Variabel bebas dalam penelitian ini ada tiga yaitu Prinsip Keadilan (X_1), Transparansi (X_2), dan Akuntabilitas (X_3).

1) Prinsip keadilan

Prinsip keadilan menurut PP No. 48 Tahun 2008 merupakan pemberian akses pelayanan pendidikan yang seluas-luasnya dan merata kepada peserta didik atau calon peserta didik, tanpa membedakan latar belakang suku, ras, agama, jenis kelamin, dan kemampuan atau status sosial-ekonomi. Adapun indikator prinsip keadilan adalah:

- a. Adanya kebijakan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat secara seimbang.
- b. Tersedianya layanan-layanan/fasilitas khusus bagi masyarakat kurang mampu.

(Bappenas, 2007)

2) Transparansi

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Indikator transparansi meliputi:

- a. Keterbukaan kebijakan anggaran sekolah.
- b. Keterbukaan laporan pertanggung jawaban.
- c. Adanya akses pada informasi yang siap, mudah dijangkau, bebas diperoleh, dan tepat waktu.

(Sutedjo, 2009)

3) Akuntabilitas

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Indikator Akuntabilitas meliputi:

- a. Sekolah melaksanakan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dalam membuat laporan keuangan
- b. adanya pelaporan keuangan secara periodik
- c. Keterlibatan semua pihak dalam penyusunan RAPBS.

(Boy dan Siringoringo, 2009)

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk pengumpulan data di dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan (Sugiyono,2010:194). Sesuai dengan pendapat Sugiyono diatas, teknik wawancara digunakan peneliti untuk mencari data awal tentang bagaimana mutu dan produktivitas institusi pendidikan di SMP N 3 Mertoyudan Kabupaten Magelang. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan salah seorang pengelola anggaran. Proses wawancara ini dilakukan secara *face to face* atau tatap muka.

2. Kuesioner / Angket

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara member seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono,2010:199). Dalam penelitian ini, teknik kuesioner digunakan untuk mengetahui variabel efektivitas, efisiensi, transparansi, dan

akuntabilitas. Kuesioner dalam penelitian ini menggunakan tipe pertanyaan tertutup.

Pertanyaan tertutup adalah pertanyaan yang mengharapkan jawaban yang singkat atau mengharapkan responden memilih alternative jawaban yang telah tersedia (Sugiyono,2010:201). Jawaban dari kuesioner diukur dengan *Skala Likert* dimana setiap responden akan memberikan *checklist* (√) pada kolom yang ditentukan. Untuk analisis kuantitatif, maka setiap jawaban akan diberi skor dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1) Sangat Setuju diberi skor | 5 |
| 2) Setuju diberi skor | 4 |
| 3) Ragu – Ragu diberi skor | 3 |
| 4) Tidak Setuju diberi skor | 2 |
| 5) Sangat Tidak Setuju diberi skor | 1 |

3.5 Analisis Instrumen

3.5.1 Uji Validitas

Menurut Sugiyono (2010) validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur. Tinggi rendahnya validitas instrumen menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang variabel yang diteliti. Karena

itulah maka dalam penelitian ini diadakan pengukuran validitas instrumen yang akan digunakan.

Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan bantuan program computer SPSS (*Statistical Package for Social Science*). Masing-masing item akan dilihat nilai signifikansinya. Jika taraf signifikansi kurang dari 5% (0,05), maka dikatakan item kuesioner tersebut valid dan dapat digunakan, namun apabila taraf signifikan lebih dari 5% (0,05), maka dikatakan item kuesioner tersebut tidak valid dan tidak dapat dipergunakan atau diperbaiki.

Berdasarkan uji validitas menggunakan program IBM SPSS dari uji coba 20 responden dengan 28 item pertanyaan diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 3.1.
Hasil Uji Validitas
Instrumen Variabel Produktivitas Sekolah

Item Pernyataan	Signifikansi	Taraf Signifikansi	Kesimpulan
Item 1	0,032	0,05	Valid
Item 2	0,012	0,05	Valid
Item 3	0,000	0,05	Valid
Item 4	0,000	0,05	Valid
Item 5	0,176	0,05	Tidak Valid
Item 6	0,283	0,05	Tidak Valid
Item 7	0,000	0,05	Valid
Item 8	0,000	0,05	Valid
Item 9	0,001	0,05	Valid

Sumber: data diolah tahun 2015

Berdasarkan Tabel 3.1. diperoleh hasil bahwa dari 9 item pertanyaan untuk variabel produktivitas sekolah, terdapat 2 item pertanyaan yang tidak valid yaitu

butir soal nomor 5 dan 6. Item pertanyaan tersebut memiliki signifikansi $> 0,05$ atau 5%. Pertanyaan yang tidak valid selanjutnya akan dibuang (*di-drop*) dan tidak dipakai dalam angket penelitian selanjutnya, karena pertanyaan tersebut tidak dapat digunakan untuk mengukur variabel produktivitas sekolah, sehingga pertanyaan lain dalam indikator yang sama sudah dapat mewakili untuk mengukur indikator dalam variabel produktivitas tersebut. Oleh karena itu item pertanyaan yang digunakan dalam penelitian merupakan item pertanyaan yang valid sejumlah 7 item.

Tabel 3.2.
Hasil Uji Validitas Instrumen
Variabel Prinsip Keadilan

Item Pernyataan	Signifikansi	Taraf Signifikansi	Kesimpulan
Item 10	0,000	0,05	Valid
Item 11	0,000	0,05	Valid
Item 12	0,000	0,05	Valid
Item 13	0,000	0,05	Valid

Sumber: data diolah tahun 2015

Dari tabel 3.2. diketahui bahwa dari 4 item pertanyaan untuk variabel prinsip keadilan, semua item pertanyaan valid. Oleh karena semua itu item pertanyaan digunakan dalam penelitian.

Tabel 3.3.

**Hasil Uji Validitas Instrumen
Variabel Transparansi**

Item Pernyataan	Signifikansi	Taraf Signifikansi	Kesimpulan
Item 14	0,000	0,05	Valid
Item 15	0,000	0,05	Valid
Item 16	0,000	0,05	Valid
Item 17	0,000	0,05	Valid
Item 18	0,000	0,05	Valid
Item 19	0,000	0,05	Valid
Item 20	0,000	0,05	Valid
Item 21	0,000	0,05	Valid

Sumber: data diolah tahun 2015

Dari tabel 3.3. diketahui bahwa dari 8 item pertanyaan untuk variabel Transparansi, semua item pertanyaan valid. Oleh karena itu semua item pertanyaan digunakan dalam penelitian.

**Tabel 3.4.
Hasil Uji Validitas Instrumen
Variabel Akuntabilitas**

Item Pernyataan	Signifikansi	Taraf Signifikansi	Kesimpulan
Item 22	0,009	0,05	Valid
Item 23	0,001	0,05	Valid
Item 24	0,002	0,05	Valid
Item 25	0,002	0,05	Valid
Item 26	0,000	0,05	Valid
Item 27	0,000	0,05	Valid
Item 28	0,000	0,05	Valid

Sumber: data diolah tahun 2015

Dari tabel 3.4. diketahui bahwa dari 7 item pertanyaan untuk variabel Transparansi, semua item pertanyaan valid. Oleh karena itu semua item pertanyaan digunakan dalam penelitian.

3.5.2 Uji Reliabilitas Instrumen

Arikunto (2010) menyatakan reliabilitas menunjukkan pada suatu pengertian bahwa suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen itu sudah baik. Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat ukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Pengolahan data untuk uji reliabilitas dalam penelitian menggunakan program SPSS. Nunnally dalam Ghazali (2011) mengatakan suatu instrumen dapat dikatakan reliabel jika pada uji signifikansi, nilai alpha lebih besar dari r kritis *product moment*. Perhitungan reliabilitas menggunakan teknik analisa *Alpha Cronbach* dengan α dinilai reliabel jika $> 0,70$ (70%).

Tabel 3.5.
Hasil Uji Reliabilitas Instrumen

Variabel	Nilai Cronbach Alpha	Cronbach Alpha (Nunnaly)	Kesimpulan
Produktivitas Sekolah (Y)	0,704	0,70	Reliabel
Prinsip Keadilan (X ₁)	0,841	0,70	Reliabel
Transparansi (X ₂)	0,790	0,70	Reliabel
Akuntabilitas (X ₃)	0,770	0,70	Reliabel

Sumber: Data diolah tahun 2015

Berdasarkan tabel 3.5. tersebut, diperoleh keterangan bahwa hasil uji reliabilitas instrumen menunjukkan *Cronbach Alpha* untuk variabel produktivitas sekolah (Y) 0,704, prinsip keadilan (X₁) sebesar 0,841, variabel transparansi (X₂) sebesar 0,790, dan untuk variabel akuntabilitas (X₃) sebesar 0,770. Sehingga dapat disimpulkan bahwa instrument keempat variabel yaitu produktivitas sekolah (Y), prinsip keadilan (X₁), transparansi (X₂), dan akuntabilitas (X₃) adalah reliabel dan memenuhi syarat uji reliabilitas instrumen karena nilai *Cronbach Alpha* > 0,70 (Nunnaly dalam Ghozali, 2010).

3.6 Metode Analisis Data

3.6.1 Analisis Deskriptif

Menurut Sugiyono (2011) analisis deskriptif ini merupakan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Analisis ini digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi empiris atas data yang dikumpulkan dalam penelitian, yaitu untuk mengetahui dan menganalisis data mengenai produktivitas sekolah, prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Berdasarkan skor angket yang diperoleh, selanjutnya dijadikan dalam persentase. Adapun rumus yang digunakan yaitu adalah:

Untuk menentukan kategori Deskriptif Persentase (DP) yang diperoleh, maka dibuat tabel kategori yang disusun dengan perhitungan sebagai berikut :

1. Menentukan angka persentase tertinggi

$$\frac{\text{Skor maksimal}}{\text{Skor maksimal}} \times 100\%$$

$$\frac{5}{5} \times 100\% = 100\%$$

- Menentukan angka persentase terendah

$$\frac{\text{Skor Minimal}}{\text{Skor Maksimal}} \times 100\% = 100\%$$

$$\frac{1}{5} \times 100\% = 20\%$$

- Menghitung rentang persentase

$$100\% - 20\% = 80\%$$

- Menghitung interval kelas persentase

$$\frac{\text{Rentang}}{\text{banyak kriteria}} = \frac{80\%}{5} = 16\%$$

- Menetapkan jenjang kriteria. Dalam menetapkan jenjang kriteria, peneliti mengelompokkan menjadi 5 kriteria, yaitu Sangat Tinggi, Tinggi, Sedang, Rendah, Sangat Rendah. Penyusunan tabel kriteria masing-masing variabel adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6.
Kriteria Analisis Deskriptif Persentase Variabel

No	Interval Persentase	Kriteria
1	85% - 100%	Sangat Tinggi
2	69% - 84%	Tinggi
3	53% - 68%	Sedang
4	37% - 52%	Rendah
5	20% - 36%	Sangat Rendah

Sumber : Data Primer diolah tahun 2015

3.6.2 Analisis Statistik Inferensial

Statistik inferensial adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi (Sugiyono:209).

3.6.2.1 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Multikolonieritas

Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel bebas saling berkorelasi, maka variabel – variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel bebas yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol (Ghozali,2011:105). Untuk melakukan uji multikolonieritas dapat menggunakan bantuan program SPSS.

2. Uji Heterokedastisitas

Uji Heterokedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut Homokedastisitas dan jika berbeda disebut Heterokedastisitas (Ghozali,2011:139). Model regresi yang baik adalah model regresi yang Homokedastisitas atau tidak terjadi Heterokedastisitas. Untuk melakukan uji Heterokedastisitas dapat menggunakan bantuan SPSS.

3. Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali,2011:160). Seperti diketahui bahwa uji t dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual berdistribusi normal. Apabila ini dilanggar maka uji statistic dikatakan tidak valid. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak

yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Untuk melakukan kedua analisis tersebut dapat menggunakan bantuan program SPSS.

4. Uji Linieritas

Uji ini digunakan untuk melihat apakah spesifikasi model yang digunakan sudah benar atau tidak. Apakah fungsi yang digunakan dalam suatu studi empiris sebaiknya berbentuk linear, kuadrat, atau kubik. Dengan uji linearitas akan diperoleh informasi apakah model empiris sebaiknya linear, kuadrat, atau kubik (Ghozali,2011:166). Untuk mendeteksi adanya keberkaitan persamaan regresi uji kelinearian garis regresi dibutuhkan bantuan dengan menggunakan anova program SPSS.

5. Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda adalah suatu perluasan dari teknik analisis regresi apabila terdapat lebih dari satu variabel bebas untuk memprediksi variabel terikat. Analisis regresi berganda digunakan untuk meramalkan bagaimana keadaan (naik – turun) variabel dependen, bila dua variabel atau lebih variabel independen sebagai faktor predictor dimanipulasi (dinaikan dan diturunkan).

Dalam penelitian ini analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas (prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas) terhadap variabel terikat (produktivitas sekolah). Adapun rumus untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel bebas adalah sebagai berikut:

$$Y = a_0 + a_1 X_1 + a_2 X_2 + a_3 X_3$$

Keterangan :

Y = Produktivitas Sekolah

a_0 = Konstanta

$a_{1,2,3}$ = koefisien regresi prediktator

X_1 = Prinsip Keadilan

X_2 = Transparansi

X_3 = Akuntabilitas

Untuk menganalisis regresi berganda, dapat menggunakan bantuan dari program SPSS.

3.7 Uji Hipotesis

3.7.1 Uji Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat secara bersama – sama (Ghozali,2011:98). Dalam penelitian ini Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas (prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas) mempunyai pengaruh secara bersama – sama terhadap variabel terikat (produktivitas sekolah). Untuk melakukan Uji F dapat menggunakan bantuan program SPSS.

Adapun cara pengambilan keputusan dapat menggunakan kriteria sebagai berikut :

1. Jika nilai probabilitas (P Value) > 0,05 maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.

Artinya tidak ada pengaruh antara variabel bebas (prinsip keadilan,

transparansi, dan akuntabilitas) terhadap variabel terikat (produktivitas sekolah).

2. Jika nilai probabilitas (P Value) $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya ada pengaruh antara variabel bebas (prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas) terhadap variabel terikat (produktivitas sekolah).

3.7.2 Uji Parsial (Uji t)

Uji parsial (uji t) digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat secara parsial (terpisah) dengan menggunakan bantuan program SPSS bisa diketahui pengaruh tersebut.

Adapun cara pengambilan keputusan dapat menggunakan kriteria sebagai berikut :

1. Jika nilai probabilitas (P Value) $> 0,05$ maka H_0 diterima, berarti H_2 ditolak itu berarti tidak ada pengaruh antara dua variabel yaitu variabel bebas (prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas) dengan variabel terikat (produktivitas sekolah) yang telah diuji tersebut.
2. Jika nilai probabilitas (P Value) $< 0,05$ maka H_0 ditolak, berarti H_2 diterima itu berarti ada pengaruh antara dua variabel yaitu variabel bebas (prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas) dengan variabel terikat (produktivitas sekolah) yang telah diuji tersebut.

3.8 Uji Koefisiensi Determinasi

3.8.1 Koefisien determinasi (R^2)

Dalam uji regresi liner berganda dianalisis pula besarnya koefisien regresi (R^2) keseluruhan. Nilai R^2 adalah antara nol dan satu. R^2 mendekati 1 (satu) maka dapat dikatakan semakin kuat kemampuan variabel bebas dalam model regresi tersebut dalam menerangkan variabel terikat. Sebaliknya jika R^2 mendekati 0 (nol) maka semakin lemah variabel bebas menerangkan variasi variabel terikatnya.

3.8.2 Koefisien Determinasi Parsial (r^2)

Koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui besarnya kontribusi yang diberikan masing-masing prediktor prinsip keadilan (X_1), transparansi (X_2) dan akuntabilitas (X_3) secara parsial terhadap variabel dependen produktivitas sekolah (Y). Koefisien determinasi dapat dilihat dari output *SPSS windows* uji parsial pada tabel *coefficients*. Caranya adalah dengan mengkuadratkan nilai *correlations partial* dalam tabel.

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diperoleh simpulan sebagai berikut.

1. Prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan anggaran secara simultan berpengaruh terhadap produktivitas sekolah sebesar 75,9%.
2. Prinsip keadilan pengelolaan anggaran berpengaruh terhadap produktivitas sekolah sebesar 22,09%.
3. Transparansi pengelolaan anggaran berpengaruh terhadap produktivitas sekolah sebesar 18,23%.
4. Akuntabilitas pengelolaan anggaran berpengaruh terhadap produktivitas sekolah sebesar 16,89 %.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti uraikan, saran yang peneliti rekomendasikan adalah sebagai berikut.

1. Sekolah diharapkan dapat melaksanakan prinsip-prinsip pengelolaan anggaran pendidikan dalam mengelola keuangan sekolah;
2. Mewujudkan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan sekolah untuk meningkatkan kepercayaan publik;

3. Perlu adanya staf khusus pengelola BOS sesuai dengan petunjuk teknis sehingga kinerja sekolah menjadi lebih efisien;
4. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperbanyak ruang lingkup sampel yang tidak hanya satu sekolah, tapi dalam cakupan yang lebih luas untuk pemetaan daerah dengan tingkat produktivitasnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Lokman Mohd. Tahir. 2014. "School Operational Funding to Support School activities". *International Journal of Evaluation and Research in Education (IJERE)*. NO. 1, Vol. 3. Pp 66-78.
- Arcaro, Jerome S. 2005. *Pendidikan Berbasis Mutu: Prinsip-prinsip Perumusan dan Tata Langkah Penerapan*. Terjemahan Yosol Iriantara. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arifi, Ahmad. 2008. "Anggaran Pendidikan dan Mutu Pendidikan (Respon Kebijakan Anggaran dari APBN Bagi Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan Madrasah)". *Jurnal Pendidikan Agama Islam*. No. 1, Vol. V.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Sebagai Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Boy, Denny, dan Hotniar Siringoringo. 2009. "Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) terhadap Partisipasi Orangtua Murid". *Jurnal Ekonomi Bisnis*, No. 12, Vol. 14. Hal 79-87.
- Hamzah. 2013. "Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Berbasis Sekolah". *Jurnal Studia Islamika*. No. 1, Vol. 10. Hal 151-175.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Progam IBM SPSS 19*. Semarang : Universitas Diponegoro.
- Hafil, Muhammad (editor). 2014. *Pengelolaan Dana Pendidikan Buruk*. <http://www.republika.co.id/berita/koran/didaktika/14/09/24/nce38c6-pengelolaan-dana-pendidikan-buruk>. (20 Februari 2015).
- Horngren, C.T, *et all*. 2012. *Cost Accounting : A Managerial Emphasis*. New Jersey: Pearson.
- Kemendikbud. 2014. *Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2014*.
- Kurniady, Dedi Achmad. 2011. "Pengelolaan Pembiayaan Sekolah Dasar di Kabupaten Bandung". *Jurnal Penelitian Pendidikan*. No. 1, Vol. 12.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Andi.
- Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008*.
- Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan..*
- Permendagri No. 13 Tahun 2006*.

- Raeni. 2014. "Pengaruh Prinsip Keadilan, Efisiensi, Transparansi, dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Terhadap Produktivitas SMK (Kajian Persepsi Guru SMK Se-Kabupaten Kendal)". *Skripsi*. Semarang: Jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
- Renstra Ditjen Dikmen. 2013. *Revisi Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah (Renstra Ditjen Dikmen) 2010- 2014*.
- Nandiarossa, Withaniar Vinka. 2013. "Analisis Efisiensi, Efektivitas, Akuntabilitas, dan Transparansi Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Pada Sekolah Dasar di Kota Magelang". *Skripsi*. Yogyakarta: Jurusan Akuntansi Universitas Islam Indonesia.
- Sakapurnama, Eko dan Nurul Safitri. "Good Governance Aspect in Implementation of The Transparency of Public Information Law". 2012. *Journal of Administratif Science and Organization*. Number. 1, Volume 19.
- Solihat, Eli, dan Toto Sugiharto. 2009. "Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Pendidikan terhadap Partisipasi Orangtua Murid di SMA Negeri 107 Jakarta". *Jurnal Ekonomi Bisnis*, No. 2 Vol. 14. Hal 135-143.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif dan kualitatif, R & D*. Bandung : Alfabeta.
- Sumardi, I Sandiawan. 2005. *Melawan Stigma Melalui pendidikan Alternatif*. Jakarta: Rosdakarya.
- Supriadi, Dedi. 2003. *Satuan Biaya Pendidikan dan Menengah*. Bandung: Rosdakarya.
- Sutedjo. 2009. "Persepsi Stakeholders terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Sekolah; Studi Kasus di Sekolah Menengah Pertama Standar Nasional Kabupaten Kendal". Tesis. Semarang: Program Pascasarjana UNDIP.
- Suti, Marsus. 2011. "Strategi Peningkatan Mutu di Era Otonom Pendidikan". *Jurnal MEDTEK*, volume 2, Nomor 3.
- Sutikno, Tri admaji. 2009. "Indikator Produktivitas Kerja Guru Sekolah Menengah Kejuruan". *Jurnal teknologi dan kejuruan*, volume 32, Nomor 1. Hal 107-118.
- Thomas, Partono. 2013. "Faktor Determinan Produktivitas Sekolah". *Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan*. Tahun 17, Nomor 1, 2013.

Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang – Undang No. 28 Tahun 1999.

Wijaya, David. 2009. “Implikasi Manajemen Keuangan Sekolah terhadap Kualitas Pendidikan”. *Jurnal Pendidikan Penabur*, No. 13 Tahun ke 8. Hal 80-96.

www.bos.kemendikbud.go.id.

www.spssindonesia.com

HASIL WAWANCARA OBSERVASI AWAL

Identitas

Nama : Abdul Gani, S.Pd.

Jabatan : Pengelola anggaran sekolah

Hasil Wawancara :

Bagaimana pengelolaan anggaran di sekolah?

Pada akhir tahun biasanya tim pengelola anggaran menyusun draf APBS untuk tahun selanjutnya, kemudian dirapatkan dengan kepala sekolah dan komite. Apabila disetujui maka APBS tersebut dapat digunakan.

Darimana asal anggaran sekolah?

Anggaran sekolah 100% dari BOS tanpa dibebankan kepada wali murid. Ada juga tambahan dari iuran kelulusan, itu pun digunakan untuk hal-hal di luar kegiatan operasional. Misalnya, untuk membelikan sepatu pada siswa yang tidak mampu dan lain-lain.

Apakah ada tim khusus untuk pengelola BOS?

Belum ada tim khusus karena keterbatasan SDM. Pengelola BOS berasal dari guru dan staf TU. Saya sendiri sebenarnya mengampu mata pelajaran bahasa Jawa.

Apakah ada kendala yang dihadapi, semisal dana BOS yang telat cair?

Tidak. Dana dari dinas biasanya tiba tepat waktu.

Apakah laporan pertanggung jawaban pengelolaan anggaran diberikan juga kepada orang tua atau wali murid, serta masyarakat umum?

Tidak semua orang dapat melihat APBS karena unsur kerahasiaan. Biasanya kami hanya melaporkan APBS ke dinas terkait seperti dinas atau BPK.

Lampiran 2

KISI-KISI INSTRUMEN UJI COBA PENELITIAN

**PENGARUH PRINSIP KEADILAN, TRANSPARANSI, DAN AKUNTABILITAS
PENGELOLAAN ANGGARAN TERHADAP PRODUKTIVITAS SEKOLAH (Studi kasus
di SMP N 3 Mertoyudan Kabupaten Magelang)**

No	Variabel	Indikator	Nomor Soal	Jumlah Soal
1.	Produktivitas Sekolah (Y)	1. Keefektifan	1, 2	2 soal
		2. Efisiensi internal	3, 4, 5	3 soal
		3. Efisiensi eksternal	6, 7	2 soal
		4. Mutu lulusan	8, 9	2 soal
2.	Prinsip Keadilan (X1)	1. Adanya kebijakan pemenuhan kebutuhan dasar sekolah secara seimbang	10, 11	2 soal
		2. Tersedianya layanan/fasilitas khusus bagi masyarakat kurang mampu	12, 13	2 soal
4.	Transparansi (X2)	1. Keterbukaan kebijakan anggaran sekolah	14, 15	2 soal
		2. Keterbukaan laporan pertanggung jawaban	16, 17, 18	3 soal
		3. Adanya akses pada informasi yang siap, mudah dijangkau, bebas diperoleh, dan tepat waktu	19, 20, 21	3 soal
5.	Akuntabilitas (X3)	1. Sekolah melaksanakan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dalam membuat laporan keuangan	22, 23	2 soal
		2. adanya pelaporan keuangan secara periodik	24, 25, 26	3 soal
		3. Keterlibatan semua pihak dalam penyusunan RAPBS.	27, 28	2 soal
TOTAL BUTIR SOAL				28 soal

Lampiran 3

ANGKET UJI COBA PENELITIAN

DAFTAR PERTANYAAN:

Berikan tanda (✓) pada kolom jawaban yang menunjukkan alternatif jawaban yang paling tepat di kolom yang tersedia dengan ketentuan:

- SS = Sangat Setuju
- S = Setuju
- RG = Ragu-Ragu
- TS = Tidak Setuju
- STS = Sangat Tidak Setuju

No	Pernyataan	Jawaban/Tanggapan				
		SS	S	RR	TS	STS
PRODUKTIVITAS SEKOLAH						
Keefektifan						
1	Seluruh siswa dapat mencapai standar kompetensi lulusan yang telah ditetapkan					
2	Hasil pencapaian standar kompetensi lulusan siswa dari tahun ke tahun mengalami peningkatan					
Efisiensi Internal						
3	Siswa dapat mencapai KKM yang telah ditetapkan					
4	Prestasi lomba akademik maupun non akademik siswa mengalami kenaikan dari tahun ketahun					
5	Lulusan belum memiliki komitmen terhadap disiplin yang baik					
Efisiensi Eksternal						
6	Jumlah lulusan yang diterima masuk SMA Negeri belum mengalami kenaikan dari tahun ketahun					
7	Kepercayaan berbagai pihak (orang tua, masyarakat, pemerintah) terhadap lulusan meningkat					
Mutu Lulusan						
8	Lulusan memuaskan pelanggan intern (guru, siswa) dan pelanggan extern (orang tua, dunia kerja).					
9	Sekolah selalu berusaha memperbaiki <i>output</i> lulusan					
VARIABEL PRINSIP KEADILAN						
Adanya kebijakan pemenuhan kebutuhan dasar sekolah secara seimbang						
10	Kebijakan pengelolaan keuangan diprioritaskan kepada pemenuhan kebutuhan dasar sekolah					

No	Pernyataan	Jawaban/Tanggapan				
		SS	S	RR	TS	STS
11	Sekolah mendorong dan memberikan motivasi kepada pemerintah dan masyarakat yang mampu untuk memberikan subsidi kepada siswa miskin.					
Tersedianya layanan/fasilitas khusus bagi masyarakat kurang mampu						
12	Sekolah memberikan beasiswa khusus bagi siswa kurang mampu					
13	Sekolah memberikan pembinaan khusus untuk siswa kurang mampu					
TRANSAPARANSI						
Keterbukaan kebijakan anggaran sekolah						
14	Kepala sekolah telah mensosialisasikan dan mempublikasikan program serta kebijakan sekolah kepada orang tua/wali murid dan masyarakat.					
15	Tujuan APBS telah tertera jelas dalam program sekolah.					
Keterbukaan laporan pertanggung jawaban						
16	Informasi disajikan dalam laporan pertanggungjawaban telah mengungkapkan seluruh informasi yang diperlukan					
17	Informasi mengenai laporan pertanggungjawaban sekolah telah tersedia untuk umum.					
18	Laporan keuangan sekolah telah disampaikan secara terbuka kepada semua pihak, baik guru, komite, maupun orang tua/wali.					
Akses informasi yang siap, mudah dijangkau, bebas diperoleh, dan tepat waktu						
19	Informasi mengenai APBS telah tersedia untuk umum					
20	Informasi mengenai target, kinerja keuangan sekolah, serta prosedur yang ada telah tersedia untuk umum					
21	Media yang digunakan sebagai penyebarluasan informasi APBS dan sosialisasinya telah memadai					
AKUNTABILITAS						
Sekolah melaksanakan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dalam membuat laporan keuangan						
22	Isi laporan keuangan yang disampaikan telah sesuai dengan peraturan yang ada					
23	Hasil yang telah dicapai untuk program jangka panjang selalu disajikan dalam LPJ sekolah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).					
Adanya pelaporan keuangan secara periodik						
24	Laporan pelaksanaan APBS secara berkala disampaikan kepada komite dan publik					

No	Pernyataan	Jawaban/Tanggapan				
		SS	S	RR	TS	STS
25	Laporan pelaksanaan APBS selalu disampaikan kepada Dinas Pendidikan secara tepat waktu.					
26	Setiap akhir tahun ajaran semua pihak berkepentingan mempunyai akses untuk melihat APBS tahun yang lalu					
Keterlibatan semua pihak dalam penyusunan RAPBS						
27	Guru, karyawan sekolah, serta masyarakat selalu dilibatkan dalam penyusunan RAPBS maupun perubahannya mencerminkan kinerja pengelolaan keuangan sekolah yang efektif dan efisien					
28	APBS telah menampung aspirasi masyarakat					

Lampiran 4

DAFTAR NAMA RESPONDEN UJI COBA

NO	KODE	NAMA GURU
1	R 01	Hikmatun Burhaniah, SPd
2	R 02	E. K. Sulomo
3	R 03	M. Budiningsih
4	R 04	Puji Astuti, S.Pd
5	R 05	Drs. Sudiono
6	R 06	Wawan Kurniawan Hidayat, S.Kom
7	R 07	Drs. Sukandar
8	R 08	Dra. Sri Suprpti
9	R 09	Mastuti, S.Pd
10	R 10	Drs. Wahyu Setiawan
11	R 11	Drs. Wasiyanta Bambang Nugraha
12	R 12	Muhammad Faroid, B.A
13	R 13	Dina Nurhayati, S.Pd
14	R 14	IsyadiI, S.Pd
15	R 15	Eni Widyastuti, S.Pd
16	R 16	Rindarti, S.Pd
17	R 17	Hernaningsih S.Pd
18	R 18	Dra. Susilowati
19	R 19	Teguh Hariyanto, S.Pd
20	R 20	Nurul Aini Kumala S.Pd

Keterangan:

Data diatas merupakan beberapa guru yang dipilih secara acak sebagai responden. Dengan rincian; 12 guru dari SMP N 1 Mertoyudan Magelang dan 8 guru dari SMP N 2 Mertoyudan Magelang.

Lampiran 5

**TABULASI DATA UJI COBA PENELITIAN
VARIABEL PRODUKTIVITAS SEKOLAH (Y)**

KODE	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	JUMLAH
R01	4	4	4	3	2	2	5	4	5	33
R02	5	4	5	4	1	2	5	5	5	36
R03	5	4	5	4	2	2	4	4	5	35
R04	5	2	4	4	2	2	5	5	5	34
R05	4	4	4	5	2	2	4	4	5	34
R06	5	5	5	4	1	1	5	4	4	34
R07	3	3	3	2	4	3	2	3	4	27
R08	4	4	4	3	2	1	4	4	5	31
R09	4	4	4	3	2	2	4	4	4	31
R10	3	4	4	3	2	2	4	3	4	29
R11	4	3	3	2	2	2	3	3	3	25
R12	4	4	4	3	2	1	3	4	4	29
R13	4	3	3	4	3	2	4	4	4	31
R14	4	5	5	4	1	1	5	5	5	35
R15	4	4	4	3	2	2	4	4	4	31
R16	5	3	3	2	3	2	3	3	3	27
R17	4	4	4	3	3	2	4	4	4	32
R18	5	5	5	3	2	2	5	4	4	35
R19	4	3	3	4	2	3	4	4	3	30
R20	4	5	4	4	4	2	5	4	4	36

TABULASI DATA UJI COBA PENELITIAN
VARIABEL PRINSIP KEADILAN (X1)

KODE	P10	P11	P12	P13	JUMLAH
R01	5	5	5	5	20
R02	5	5	5	5	20
R03	4	5	4	4	17
R04	5	5	5	5	20
R05	5	5	4	5	19
R06	5	5	5	5	20
R07	3	2	2	2	9
R08	4	4	3	3	14
R09	4	3	3	3	13
R10	3	3	3	3	12
R11	3	4	3	3	13
R12	4	3	3	3	13
R13	4	4	4	3	15
R14	5	5	4	4	18
R15	4	4	4	3	15
R16	3	4	4	4	15
R17	4	4	3	2	13
R18	4	4	4	5	17
R19	4	5	5	5	19
R20	4	5	5	5	19

TABULASI DATA UJI COBA PENELITIAN
VARIABEL TRANSPARANSI (X2)

KODE	P14	P15	P16	P17	P18	P19	P20	P21	JUMLAH
R01	4	4	4	4	4	4	4	4	32
R02	5	5	5	4	4	4	4	4	35
R03	4	4	3	2	4	3	2	4	26
R04	5	5	4	4	5	4	4	4	35
R05	5	5	5	5	5	5	5	5	40
R06	5	5	5	4	5	5	5	5	39
R07	2	2	2	2	2	2	2	2	15
R08	3	3	4	4	3	3	3	2	25
R09	3	4	4	4	4	4	4	3	30
R10	4	4	2	2	4	2	2	2	22
R11	3	4	4	4	4	3	3	3	28
R12	4	3	4	5	4	3	4	4	31
R13	3	3	3	4	4	4	5	3	29
R14	4	5	5	5	5	5	4	4	37
R15	2	2	4	3	3	4	3	2	23
R16	4	4	4	4	3	2	3	2	26
R17	2	4	2	2	3	2	2	2	19
R18	5	4	4	3	4	3	4	3	30
R19	3	4	5	4	4	3	4	3	30
R20	3	3	3	3	5	4	5	4	30

TABULASI DATA UJI COBA PENELITIAN
VARIABEL AKUNTABILITAS (X3)

KODE	P22	P23	P24	P25	P26	P27	P28	JUMLAH
R01	4	4	4	3	3	4	4	26
R02	5	5	4	2	4	4	4	28
R03	4	4	4	5	3	3	4	27
R04	4	4	5	5	4	4	4	30
R05	5	5	5	5	5	5	5	35
R06	5	5	4	5	5	5	5	34
R07	4	3	4	3	2	2	2	20
R08	4	3	4	4	4	4	3	26
R09	4	4	3	4	3	5	5	28
R10	3	4	4	3	2	4	2	22
R11	4	4	2	3	3	3	4	23
R12	4	4	3	3	3	4	3	24
R13	4	4	3	3	3	3	4	24
R14	5	5	4	5	5	5	4	33
R15	4	4	4	4	4	4	4	28
R16	4	4	3	3	2	4	3	23
R17	4	4	4	4	2	3	2	23
R18	4	5	3	3	3	5	5	28
R19	3	4	4	5	4	4	3	27
R20	3	4	4	4	5	4	4	28

**HASIL PERHITUNGAN VALIDITAS INSTRUMEN PENELITIAN
VARIABEL PRODUKTIVITAS SEKOLAH (Y)**

Correlations

	VAR00001	VAR00002	VAR00003	VAR00004	VAR00005	VAR00006	VAR00007	VAR00008	VAR00009	VAR00010
VAR00001 Pearson Correlation	1	.063	.471*	.274	-.390	-.248	.461*	.452*	.147	.479*
Sig. (2-tailed)		.791	.036	.243	.089	.293	.041	.045	.535	.032
N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
VAR00002 Pearson Correlation	.063	1	.714**	.243	-.264	-.504*	.479*	.198	.242	.550*
Sig. (2-tailed)	.791		.000	.302	.260	.023	.033	.402	.304	.012
N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
VAR00003 Pearson Correlation	.471*	.714**	1	.446*	-.609**	-.525*	.681**	.600**	.626**	.791**
Sig. (2-tailed)	.036	.000		.049	.004	.017	.001	.005	.003	.000
N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
VAR00004 Pearson Correlation	.274	.243	.446*	1	-.342	-.152	.631**	.680**	.521*	.762**
Sig. (2-tailed)	.243	.302	.049		.140	.521	.003	.001	.018	.000
N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
VAR00005 Pearson Correlation	-.390	-.264	-.609**	-.342	1	.503*	-.474*	-.501*	-.345	-.315
Sig. (2-tailed)	.089	.260	.004	.140		.024	.035	.024	.137	.176
N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
VAR00006 Pearson Correlation	-.248	-.504*	-.525*	-.152	.503*	1	-.313	-.331	-.356	-.252
Sig. (2-tailed)	.293	.023	.017	.521	.024		.179	.154	.124	.283
N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
VAR00007 Pearson Correlation	.461*	.479*	.681**	.631**	-.474*	-.313	1	.725**	.497*	.856**
Sig. (2-tailed)	.041	.033	.001	.003	.035	.179		.000	.026	.000

N		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
VAR00008	Pearson Correlation	.452 [*]	.198	.600 ^{**}	.680 ^{**}	-.501 [*]	-.331	.725 ^{**}	1	.650 ^{**}	.779 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.045	.402	.005	.001	.024	.154	.000		.002	.000
N		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
VAR00009	Pearson Correlation	.147	.242	.626 ^{**}	.521 [*]	-.345	-.356	.497 [*]	.650 ^{**}	1	.683 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.535	.304	.003	.018	.137	.124	.026	.002		.001
N		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
VAR00010	Pearson Correlation	.479 [*]	.550 [*]	.791 ^{**}	.762 ^{**}	-.315	-.252	.856 ^{**}	.779 ^{**}	.683 ^{**}	1
	Sig. (2-tailed)	.032	.012	.000	.000	.176	.283	.000	.000	.001	
N		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

HASIL PERHITUNGAN VALIDITAS INSTRUMEN PENELITIAN
VARIABEL PRINSIP Keadilan (X1)

Correlations

		VAR00001	VAR00002	VAR00003	VAR00004	VAR00005
VAR00001	Pearson Correlation	1	.705**	.659**	.626**	.801**
	Sig. (2-tailed)		.001	.002	.003	.000
	N	20	20	20	20	20
VAR00002	Pearson Correlation	.705**	1	.865**	.789**	.928**
	Sig. (2-tailed)	.001		.000	.000	.000
	N	20	20	20	20	20
VAR00003	Pearson Correlation	.659**	.865**	1	.885**	.951**
	Sig. (2-tailed)	.002	.000		.000	.000
	N	20	20	20	20	20
VAR00004	Pearson Correlation	.626**	.789**	.885**	1	.929**
	Sig. (2-tailed)	.003	.000	.000		.000
	N	20	20	20	20	20
VAR00005	Pearson Correlation	.801**	.928**	.951**	.929**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	20	20	20	20	20

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

HASIL PERHITUNGAN VALIDITAS INSTRUMEN PENELITIAN
VARIABEL TRANSPARANSI (X2)

Correlations

		VAR00001	VAR00002	VAR00003	VAR00004	VAR00005	VAR00006	VAR00007	VAR00008	VAR00009
VAR00001	Pearson Correlation	1	.756**	.534*	.417	.653**	.413	.445*	.705**	.759**
	Sig. (2-tailed)		.000	.015	.067	.002	.070	.049	.001	.000
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20
VAR00002	Pearson Correlation	.756**	1	.527*	.386	.673**	.415	.313	.643**	.720**
	Sig. (2-tailed)	.000		.017	.093	.001	.069	.180	.002	.000
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20
VAR00003	Pearson Correlation	.534*	.527*	1	.811**	.495*	.671**	.620**	.606**	.815**
	Sig. (2-tailed)	.015	.017		.000	.027	.001	.004	.005	.000
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20
VAR00004	Pearson Correlation	.417	.386	.811**	1	.487*	.615**	.698**	.555*	.770**
	Sig. (2-tailed)	.067	.093	.000		.029	.004	.001	.011	.000
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20
VAR00005	Pearson Correlation	.653**	.673**	.495*	.487*	1	.731**	.707**	.877**	.861**
	Sig. (2-tailed)	.002	.001	.027	.029		.000	.000	.000	.000
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20
VAR00006	Pearson Correlation	.413	.415	.671**	.615**	.731**	1	.786**	.773**	.835**
	Sig. (2-tailed)	.070	.069	.001	.004	.000		.000	.000	.000
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20
VAR00007	Pearson Correlation	.445*	.313	.620**	.698**	.707**	.786**	1	.710**	.818**
	Sig. (2-tailed)	.049	.180	.004	.001	.000	.000		.000	.000

N		20	20	20	20	20	20	20	20	20
VAR00008	Pearson Correlation	.705**	.643**	.606**	.555*	.877**	.773**	.710**	1	.906**
	Sig. (2-tailed)	.001	.002	.005	.011	.000	.000	.000		.000
N		20	20	20	20	20	20	20	20	20
VAR00009	Pearson Correlation	.759**	.720**	.815**	.770**	.861**	.835**	.818**	.906**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
N		20	20	20	20	20	20	20	20	20

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

HASIL PERHITUNGAN VALIDITAS INSTRUMEN PENELITIAN
VARIABEL AKUNTABILITAS (X3)

Correlations

		VAR00001	VAR00002	VAR00003	VAR00004	VAR00005	VAR00006	VAR00007	VAR00008
VAR00001	Pearson Correlation	1	.571**	.152	.110	.377	.321	.471*	.568**
	Sig. (2-tailed)		.009	.523	.645	.101	.167	.036	.009
	N	20	20	20	20	20	20	20	20
VAR00002	Pearson Correlation	.571**	1	.094	.151	.482*	.668**	.632**	.704**
	Sig. (2-tailed)	.009		.694	.526	.031	.001	.003	.001
	N	20	20	20	20	20	20	20	20
VAR00003	Pearson Correlation	.152	.094	1	.541*	.437	.156	-.038	.482*
	Sig. (2-tailed)	.523	.694		.014	.054	.512	.875	.002
	N	20	20	20	20	20	20	20	20
VAR00004	Pearson Correlation	.110	.151	.541*	1	.569**	.322	.271	.655**
	Sig. (2-tailed)	.645	.526	.014		.009	.167	.247	.002
	N	20	20	20	20	20	20	20	20
VAR00005	Pearson Correlation	.377	.482*	.437	.569**	1	.574**	.599**	.868**
	Sig. (2-tailed)	.101	.031	.054	.009		.008	.005	.000
	N	20	20	20	20	20	20	20	20
VAR00006	Pearson Correlation	.321	.668**	.156	.322	.574**	1	.632**	.762**
	Sig. (2-tailed)	.167	.001	.512	.167	.008		.003	.000
	N	20	20	20	20	20	20	20	20
VAR00007	Pearson Correlation	.471*	.632**	-.038	.271	.599**	.632**	1	.754**
	Sig. (2-tailed)	.036	.003	.875	.247	.005	.003		.000

	N	20	20	20	20	20	20	20	20
VAR00008	Pearson Correlation	.568**	.704**	.482*	.655**	.868**	.762**	.754**	1
	Sig. (2-tailed)	.009	.001	.032	.002	.000	.000	.000	
	N	20	20	20	20	20	20	20	20

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

HASIL PERHITUNGAN RELIABILITAS INSTRUMEN

VARIABEL PRODUKTIVITAS SEKOLAH (Y)

Reliability Statistics

	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
Cronbach's Alpha		
.704	.722	10

VARIABEL PRINSIP KEADILAN (X1)

Reliability Statistics

	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
Cronbach's Alpha		
.841	.956	5

VARIABEL TRANSPARANSI (X2)

Reliability Statistics

	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
Cronbach's Alpha		
.790	.944	9

VARIABEL AKUNTABILITAS (X3)

Reliability Statistics

	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
Cronbach's Alpha		
.770	.872	8

Lampiran 8

DAFTAR NAMA RESPONDEN PENELITIAN

No	Kode	NAMA GURU	PENGAMPU
1	R01	Muh. Samsudin S.Pd	Bahasa Inggris
2	R02	Arum Rahmanti, S.Pd	Bahasa Inggris
3	R03	Laelatul Arafah S.Pd I	PAI
4	R04	Sri Mujiati, S.Pd	Bahsa inggris
5	R05	Sri Utami, S.Pd	IPA
6	R06	Bahrudin, B.A	PAI
7	R07	Sudi Harsono	Matematika
8	R08	Prayitno Abadi	Penjas OR
9	R09	Abdul Gani, S.Pd	Bahasa Jawa
10	R10	Khatijah, S.Pd	Ekonomi
11	R11	Widhie Wijayanti, S.Pd	Penjas OR
12	R12	Nursilowati, S.Pd	Bahasa Indonesia
13	R13	Rusdi, S.Pd	IPA
14	R14	Nurul Taufiki Ufa, S.Pd	Matematika
15	R15	Endang Sri Handayani, S.Pd	Geografi
16	R16	Sukati, S.Pd	Pkn
17	R17	Drs. Maksum	BK
18	R18	Anita Rahmandani, S.Pd	BK
19	R19	Habib Fahrudin, S.Pd	BK
20	R20	Sri Hidayati, S.Pd	Pkn
21	R21	Sumpana, S.Pd	Matematika
21	R22	Sri Wisumawati	Agama Kristen
23	R23	Mashuri, S.Pd	IPA
24	R24	Amir Solikhah, S.Pd	Kesenian
25	R25	Chatarina Nur Ainin, S.Pd	Sejarah
26	R26	Misbah, S.Kom	Komputer
27	R27	Nurul Aida, SE	Ekonomi
28	R28	Robertus Sutopo, S.Pd	Agama Katolik
29	R29	Rohadi Maiyatna, S.Pd	IPA
30	R30	Siti Zuhriyah, S.Pd	Bahasa Indonesia
31	R31	Sri Yuniati, S.Pd	Kesenian

Lampiran 9

KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN

**PENGARUH PRINSIP KEADILAN, TRANSPARANSI, DAN AKUNTABILITAS
PENGELOLAAN ANGGARAN TERHADAP PRODUKTIVITAS SEKOLAH (Studi kasus
di SMP N 3 Mertoyudan Kabupaten Magelang)**

No	Variabel	Indikator	Nomor Soal	Jumlah Soal
2.	Produktivitas Sekolah (Y)	1. Keefektifan	1, 2	2 soal
		2. Efisiensi internal	3, 4	2 soal
		3. Efisiensi eksternal	5	1 soal
		4. Mutu lulusan	6, 7	2 soal
2.	Prinsip Keadilan (X1)	1. Adanya kebijakan pemenuhan kebutuhan dasar sekolah secara seimbang	8, 9	2 soal
		2. Tersedianya layanan/fasilitas khusus bagi masyarakat kurang mampu	10, 11	2 soal
4.	Transparansi (X2)	1. Keterbukaan kebijakan anggaran sekolah	12, 13	3 soal
		2. Keterbukaan laporan pertanggung jawaban	14, 15, 16	3 soal
		3. Adanya akses pada informasi yang siap, mudah dijangkau, bebas diperoleh, dan tepat waktu	17, 18, 19	3 soal
5.	Akuntabilitas (X3)	1. Sekolah melaksanakan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dalam membuat laporan keuangan	20, 21	2 soal
		2. adanya pelaporan keuangan secara periodik	22, 23, 24	3 soal
		3. Keterlibatan semua pihak dalam penyusunan RAPBS.	25, 26	2 soal
TOTAL BUTIR SOAL				26 soal

INSTRUMEN PENELITIAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

FAKULTAS EKONOMI (FE)

Alamat: Gedung C6 Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang.

Telp/Fax: (024) 8508015, email: ekonomi@unes.ac.id

Dengan hormat,

Dalam rangka penyusunan skripsi untuk menyelesaikan studi Strata 1 (S1) di Universitas Negeri Semarang, dengan judul “Pengaruh Prinsip Keadilan, Transparansi, dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan terhadap Produktivitas Sekolah”, maka dengan segala kerendahan hati, saya memohon kesediaan Bapak/Ibu untuk dapat mengisi kuesioner penelitian terlampir dengan jujur dan apa adanya, sesuai dengan apa yang Bapak/Ibu rasakan.

Semua informasi yang telah Bapak/Ibu sampaikan dalam kuesioner ini, akan saya perlakukan dengan sangat rahasia dan akan digunakan untuk kepentingan penelitian ini semata. Keberhasilan penelitian ini sangat tergantung pada perhatian dan partisipasi Bapak/Ibu dalam mengisi kuesioner ini secara sungguh-sungguh. Oleh karena itu, besar harapan saya, Bapak/Ibu berkenan mengisi kuesioner terlampir.

Atas perhatian dan kesediaan Bapak/Ibu yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk kuesioner ini, saya mengucapkan terima kasih.

Hormat saya,

M. Hidayat Dwi S

NIM 7101410051

PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER

Pengisian kuesioner terdiri dari dua bagian, yakni: (1) Identitas Responden, (2) Daftar Pertanyaan.

IDENTITAS RESPONDEN

Nama Sekolah :
 Nama Lengkap :
 Program Keahlian :
 Jabatan * : PNS Guru Tetap/PNS Guru Tidak Tetap/Non PNS Guru Tetap/
 Non PNS Guru Tidak Tetap

Jenis Kelamin* : L/P

Masa Kerja : tahun

*coret yang tidak perlu

DAFTAR PERTANYAAN:

Berikan tanda (√) pada kolom jawaban yang menunjukkan alternatif jawaban yang paling tepat di kolom yang tersedia dengan ketentuan:

SS = Sangat Setuju

S = Setuju

RR = Ragu-Ragu

TS = Tidak Setuju

STS = Sangat Tidak Setuju

No	Pernyataan	Jawaban/Tanggapan				
		SS	S	RR	TS	STS
PRODUKTIVITAS SEKOLAH						
Keefektifan						
1	Seluruh siswa dapat mencapai standar kompetensi lulusan yang telah ditetapkan					
2	Hasil pencapaian standar kompetensi lulusan siswa dari tahun ke tahun mengalami peningkatan					
Efisiensi Internal						
3	Siswa dapat mencapai KKM yang telah ditetapkan					
4	Prestasi lomba akademik maupun non akademik siswa mengalami kenaikan dari tahun ketahun					
Efisiensi Eksternal						
5	Kepercayaan berbagai pihak (orang tua, masyarakat, pemerintah) terhadap lulusan meningkat					
Mutu Lulusan						
6	Hasil lulusan memuaskan pelanggan intern (guru, siswa) dan pelanggan extern (orang tua, dunia kerja).					
7	Sekolah selalu berusaha memperbaiki <i>output</i> lulusan					
VARIABEL PRINSIP KEADILAN						
Adanya kebijakan pemenuhan kebutuhan dasar sekolah secara seimbang						

No	Pernyataan	Jawaban/Tanggapan				
		SS	S	RR	TS	STS
8	Kebijakan pengelolaan keuangan diprioritaskan kepada pemenuhan kebutuhan dasar sekolah					
9	Sekolah mendorong dan memberikan motivasi kepada pemerintah dan masyarakat yang mampu untuk memberikan subsidi kepada siswa miskin.					
Tersedianya layanan/fasilitas khusus bagi masyarakat kurang mampu						
10	Sekolah memberikan beasiswa khusus bagi siswa kurang mampu					
11	Sekolah memberikan pembinaan khusus untuk siswa kurang mampu					
TRANSAPARANSI						
Keterbukaan kebijakan anggaran sekolah						
12	Kepala sekolah telah mensosialisasikan dan mempublikasikan program serta kebijakan sekolah kepada orang tua/wali murid dan masyarakat.					
13	Tujuan APBS telah tertera jelas dalam program sekolah.					
Keterbukaan laporan pertanggung jawaban						
14	Informasi disajikan dalam laporan pertanggungjawaban telah mengungkapkan seluruh informasi yang diperlukan					
15	Informasi mengenai laporan pertanggungjawaban sekolah telah tersedia untuk umum.					
16	Laporan keuangan sekolah telah disampaikan secara terbuka kepada semua pihak, baik guru, komite, maupun orang tua/wali.					
Akses informasi yang siap, mudah dijangkau, bebas diperoleh, dan tepat waktu						
17	Informasi mengenai APBS telah tersedia untuk umum					
18	Informasi mengenai target, kinerja keuangan sekolah, serta prosedur yang ada telah tersedia untuk umum					
19	Media yang digunakan sebagai penyebarluasan informasi APBS dan sosialisasinya telah memadai					
AKUNTABILITAS						
Sekolah melaksanakan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dalam membuat laporan keuangan						
20	Isi laporan keuangan yang disampaikan telah sesuai dengan peraturan yang ada					
21	Hasil yang telah dicapai untuk program jangka panjang selalu disajikan dalam LPJ sekolah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).					
Adanya pelaporan keuangan secara periodik						

No	Pernyataan	Jawaban/Tanggapan				
		SS	S	RR	TS	STS
22	Laporan pelaksanaan APBS secara berkala disampaikan kepada komite dan publik					
23	Laporan pelaksanaan APBS selalu disampaikan kepada Dinas Pendidikan secara tepat waktu.					
24	Setiap akhir tahun ajaran semua pihak berkepentingan mempunyai akses untuk melihat APBS tahun yang lalu					
Keterlibatan semua pihak dalam penyusunan RAPBS						
25	Guru, karyawan sekolah, serta masyarakat selalu dilibatkan dalam penyusunan RAPBS maupun perubahannya mencerminkan kinerja pengelolaan keuangan sekolah yang efektif dan efisien					
26	APBS telah menampung aspirasi masyarakat					

DATA HASIL INSTRUMEN PENELITIAN
VARIABEL PRODUKTIVITAS SEKOLAH

Resp	S01	S02	Σ	%	Kategori	S03	S04	Σ	%	Kategori	S5	Σ	%	Kategori	S6	S7	Σ	%	Kategori	Prod. Sekolah	Kategori
R001	5	5	10	100	ST	5	4	9	90	ST	5	5	100	ST	5	5	10	100	ST	34	ST
R002	5	5	10	100	ST	5	5	10	100	ST	5	5	100	ST	5	5	10	100	ST	35	ST
R003	4	4	8	80	T	4	4	8	80	T	5	5	100	ST	4	5	9	90	ST	30	ST
R004	2	4	6	60	SD	3	3	6	60	SD	3	3	60	SD	4	5	9	90	ST	24	T
R005	4	4	8	80	T	5	5	10	100	ST	4	4	80	T	4	5	9	90	ST	31	ST
R006	2	4	6	60	SD	4	2	6	60	SD	4	4	80	T	4	4	8	80	T	24	T
R007	4	4	8	80	T	4	4	8	80	T	4	4	80	T	4	3	7	70	T	27	T
R008	4	5	9	90	ST	4	4	8	80	T	5	5	100	ST	5	5	10	100	ST	32	ST
R009	4	2	6	60	SD	4	2	6	60	SD	4	4	80	T	5	5	10	100	ST	26	T
R010	4	4	8	80	T	4	3	7	70	T	5	5	100	ST	4	5	9	90	ST	29	T
R011	4	4	8	80	T	4	3	7	70	T	5	5	100	ST	5	5	10	100	ST	30	ST
R012	5	5	10	100	ST	5	5	10	100	ST	5	5	100	ST	5	5	10	100	ST	35	ST
R013	5	5	10	100	ST	5	4	9	90	ST	5	5	100	ST	5	5	10	100	ST	34	ST
R014	4	4	8	80	T	4	4	8	80	T	4	4	80	T	4	5	9	90	ST	29	T
R015	5	4	9	90	ST	4	4	8	80	T	4	4	80	T	4	4	8	80	T	29	T
R016	4	4	8	80	T	4	4	8	80	T	4	4	80	T	4	4	8	80	T	28	T
R017	2	4	6	60	SD	3	3	6	60	SD	4	4	80	T	4	4	8	80	T	24	T
R018	4	4	8	80	T	4	4	8	80	T	4	4	80	T	3	4	7	70	T	27	T
R019	4	4	8	80	T	4	4	8	80	T	4	4	80	T	4	4	8	80	T	28	T
R020	4	4	8	80	T	4	4	8	80	T	5	5	100	ST	4	5	9	90	ST	30	ST
R021	4	4	8	80	T	4	4	8	80	T	4	4	80	T	5	3	8	80	T	28	T
R022	3	4	7	70	T	4	4	8	80	T	4	4	80	T	4	4	8	80	T	27	T
R023	5	5	10	100	ST	5	5	10	100	ST	5	5	100	ST	5	5	10	100	ST	35	ST

Resp	S01	S02	Σ	%	Kategori	S03	S04	Σ	%	Kategori	S5	Σ	%	Kategori	S6	S7	Σ	%	Kategori	Prod. Sekolah	Kategori
R024	4	3	7	70	T	5	5	10	100	ST	5	5	100	ST	4	4	8	80	T	30	ST
R025	4	3	7	70	T	3	3	6	60	SD	4	4	80	T	4	4	8	80	T	86	T
R026	4	4	8	80	T	3	3	6	60	SD	4	4	80	T	4	4	8	80	T	92	T
R027	5	4	9	90	ST	5	4	9	90	ST	4	4	80	T	4	4	8	80	T	101	ST
R028	4	4	8	80	T	3	5	8	80	T	5	5	100	ST	3	3	6	60	SD	92	T
R029	4	3	7	70	T	4	4	8	80	T	5	5	100	ST	5	5	10	100	ST	92	ST
R030	4	3	7	70	T	4	4	8	80	T	4	4	80	T	3	3	6	60	SD	101	T
R031	4	4	8	80	T	3	3	6	60	SD	3	3	60	SD	4	4	8	80	T	79	T
Jumlah	124	124	248			126	119	245			135	135			131	135	266			894	
Rata-rata	4	4	8	80	T	4.01	3.84	7.90	79.03	T	4.35	4.35	87.10	ST	4.23	4.35	8.58	85.81	ST	28.84	

Keterangan:

ST = Sangat tinggi

T = Tinggi

SD = Sedang

R = Rendah

SR = Sangat rendah

**DATA HASIL INSTRUMEN PENELITIAN
VARIABEL PRINSIP KEADILAN**

Resp	S8	S9	Σ	%	Kategori	S10	S11	Σ	%	Kategori	Prinsip Keadilan	Kategori
R001	5	5	10	100	ST	5	5	10	100	ST	20	ST
R002	5	5	10	100	ST	5	5	10	100	ST	20	ST
R003	4	4	8	80	T	5	4	9	90	ST	17	T
R004	3	3	6	60	SD	3	3	6	60	SD	12	SD
R005	4	5	9	90	ST	4	4	8	80	T	17	T
R006	4	3	7	70	T	4	4	8	80	T	15	T
R007	4	5	9	90	ST	5	4	9	90	ST	18	ST
R008	4	4	8	80	T	4	4	8	80	T	16	T
R009	5	4	9	90	ST	4	4	8	80	T	17	T
R010	5	5	10	100	ST	5	5	10	100	ST	20	ST
R011	4	4	8	80	T	4	4	8	80	T	16	T
R012	4	5	9	90	ST	5	5	10	100	ST	19	ST
R013	5	4	9	90	ST	5	5	10	100	ST	19	ST
R014	4	4	8	80	T	4	3	7	70	T	15	T
R015	4	4	8	80	T	3	4	7	70	T	15	T
R016	4	4	8	80	T	4	4	8	80	T	16	T
R017	4	4	8	80	T	3	4	7	70	T	15	T
R018	4	3	7	70	T	4	4	8	80	T	15	T
R019	4	4	8	80	T	4	4	8	80	T	16	T
R020	4	4	8	80	T	3	4	7	70	T	15	T
R021	4	5	9	90	ST	4	4	8	80	T	17	T
R022	4	4	8	80	T	4	4	8	80	T	16	T
R023	5	4	9	90	ST	5	5	10	100	ST	19	ST
R024	4	3	7	70	T	4	5	9	90	ST	16	T

Resp	S8	S9	Σ	%	Kategori	S10	S11	Σ	%	Kategori	Prinsip Keadilan	Kategori
R025	3	4	7	70	T	3	4	7	70	T	14	T
R026	4	4	8	80	T	4	5	9	90	ST	17	T
R027	5	5	10	100	ST	5	5	10	100	ST	20	ST
R028	3	3	6	60	SD	3	4	7	70	T	13	SD
R029	5	5	10	100	ST	4	4	8	80	T	18	ST
R030	3	4	7	70	T	4	4	8	80	T	15	T
R031	4	3	7	70	T	4	3	7	70	T	14	T
Jumlah	128	127	255			127	130	257			512	
Rata-rata	4.13	4.20	8.23	82.26	T	4.10	4.19	8.29	82.90	T	16.52	

Keterangan:

ST = Sangat tinggi

T = Tinggi

SD = Sedang

R = Rendah

SR = Sangat rendah

**DATA HASIL INSTRUMEN PENELITIAN
VARIABEL TRANSPARANSI**

Resp	S41	S42	Σ	%	Kategori	S44	S45	S46	Σ	%	Kategori	S47	S48	S49	Σ	%	Kategori	Transparansi	Kategori
R001	5	4	9	90	ST	4	4	5	13	86.7	ST	4	4	5	13	86.7	ST	35	ST
R002	5	5	10	100	ST	5	5	5	15	100	ST	5	5	5	15	100	ST	40	ST
R003	5	4	9	90	ST	4	4	4	12	80	T	3	4	3	10	66.7	SD	31	T
R004	4	4	8	80	T	4	3	3	10	66.7	SD	3	3	2	8	53.3	SD	26	SD
R005	4	4	8	80	T	4	4	5	13	86.7	ST	4	4	4	12	80	T	33	T
R006	4	4	8	80	T	4	3	4	11	73.3	T	4	4	3	11	73.3	T	30	T
R007	4	4	8	80	T	4	3	4	11	73.3	T	3	3	3	9	60	SD	28	T
R008	4	4	8	80	T	4	3	4	11	73.3	T	3	3	3	9	60	SD	28	T
R009	3	3	6	60	SD	4	4	4	12	80	T	4	4	4	12	80	T	30	T
R010	4	4	8	80	T	4	4	5	13	86.7	ST	2	2	3	7	46.7	R	28	T
R011	5	5	10	100	ST	5	3	4	12	80	T	4	4	4	12	80	T	34	T
R012	4	4	8	80	T	4	4	4	12	80	T	5	4	5	14	93.3	ST	34	T
R013	5	5	10	100	ST	4	5	5	14	93.3	ST	4	5	4	13	86.7	ST	37	ST
R014	4	4	8	80	T	4	4	4	12	80	T	4	4	4	12	80	T	32	T
R015	5	5	10	100	ST	4	3	4	11	73.3	T	4	4	4	12	80	T	33	T
R016	4	4	8	80	T	4	4	4	12	80	T	4	4	4	12	80	T	32	T
R017	4	3	7	70	T	3	2	3	8	53.3	SD	3	3	2	8	53.3	SD	23	SD
R018	4	4	8	80	T	4	4	4	12	80	T	4	4	3	11	73.3	T	31	T
R019	4	4	8	80	T	4	4	3	11	73.3	T	3	4	3	10	66.7	SD	29	T
R020	4	5	9	90	ST	5	5	5	15	100	ST	4	3	5	12	80	T	36	ST
R021	4	4	8	80	T	4	4	2	10	66.7	SD	3	3	4	10	66.7	SD	28	T
R022	4	4	8	80	T	4	4	4	12	80	T	4	3	3	10	66.7	SD	30	T

Resp	S41	S42	Σ	%	Kategori	S44	S45	S46	Σ	%	Kategori	S47	S48	S49	Σ	%	Kategori	Transparansi	Kategori
R023	4	4	8	80	T	5	4	4	13	86.7	ST	5	4	5	14	93.3	ST	35	ST
R024	5	5	10	100	ST	4	4	4	12	80	T	4	4	4	12	80	T	34	T
R025	3	4	7	70	T	4	3	3	10	66.7	SD	4	4	4	12	80	T	29	T
R026	3	4	7	70	T	4	3	4	11	73.3	T	4	4	4	12	80	T	30	T
R027	5	4	9	90	ST	5	4	5	14	93.3	ST	5	5	4	14	93.3	ST	37	ST
R028	4	4	8	80	T	4	3	4	11	73.3	T	5	3	3	11	73.3	T	30	T
R029	4	4	8	80	T	5	3	3	11	73.3	T	3	4	4	11	73.3	T	30	T
R030	3	3	6	60	SD	3	4	4	11	73.3	T	4	4	4	12	80	T	29	T
R031	3	3	6	60	SD	3	4	4	11	73.3	T	4	3	3	10	66.7	SD	27	SD
Jumlah	127	126	253			127	115	124	366			119	116	115	350			969	
Rata-rata	4.1	4.06	8.16	81.6	T	4.1	3.71	4	11.8	78.7	T	3.84	3.74	3.71	11.3	75.3	T	31.26	

Keterangan:

ST = Sangat tinggi

T = Tinggi

SD = Sedang

R = Rendah

SR = Sangat rendah

**DATA HASIL INSTRUMEN PENELITIAN
VARIABEL AKUNTABILITAS**

Resp	S54	S55	Σ	%	Kategori	S63	S64	S65	Σ	%	Kategori	S66	S67	Σ	%	Kategori	Akuntabilitas	Kategori
R001	5	4	9	90	ST	5	4	4	13	86.67	ST	5	5	10	100	ST	32	ST
R002	5	5	10	100	ST	5	5	5	15	100	ST	5	5	10	100	ST	35	ST
R003	3	4	7	70	T	3	4	3	10	66.67	SD	4	4	8	80	T	25	T
R004	4	4	8	80	T	3	3	3	9	60	SD	4	3	7	70	T	24	T
R005	4	4	8	80	T	4	4	4	12	80	T	4	4	8	80	T	28	T
R006	4	3	7	70	T	3	4	3	10	66.67	SD	4	4	8	80	T	25	T
R007	4	4	8	80	T	4	4	4	12	80	T	4	4	8	80	T	28	T
R008	4	4	8	80	T	4	4	4	12	80	T	4	4	8	80	T	28	T
R009	5	5	10	100	ST	4	5	4	13	86.67	ST	5	4	9	90	ST	32	ST
R010	4	3	7	70	T	4	4	4	12	80	T	4	4	8	80	T	27	T
R011	4	4	8	80	T	4	4	4	12	80	T	4	4	8	80	T	28	T
R012	4	4	8	80	T	5	4	5	14	93.33	ST	4	5	9	90	ST	31	ST
R013	5	5	10	100	ST	5	5	5	15	100	ST	5	4	9	90	ST	34	ST
R014	4	4	8	80	T	4	4	4	12	80	T	4	4	8	80	T	28	T
R015	4	4	8	80	T	4	4	3	11	73.33	T	4	4	8	80	T	27	T
R016	4	4	8	80	T	4	4	4	12	80	T	4	4	8	80	T	28	T
R017	3	3	6	60	SD	3	3	3	9	60	SD	3	4	7	70	T	22	SD
R018	4	3	7	70	T	4	4	3	11	73.33	T	4	4	8	80	T	26	T
R019	4	3	7	70	T	4	4	3	11	73.33	T	4	4	8	80	T	26	T
R020	4	4	8	80	T	4	4	4	12	80	T	5	4	9	90	ST	29	T
R021	4	4	8	80	T	3	4	3	10	66.67	SD	3	4	7	70	T	25	T
R022	4	4	8	80	T	4	4	4	12	80	T	3	4	7	70	T	27	T
R023	5	5	10	100	ST	5	5	4	14	93.33	ST	5	5	10	100	ST	34	ST
R024	4	4	8	80	T	3	4	4	11	73.33	T	4	5	9	90	ST	28	T
R025	4	3	7	70	T	4	4	4	12	80	T	3	4	7	70	T	26	T
R026	3	4	7	70	T	3	4	4	11	73.33	T	3	4	7	70	T	25	T

Resp	S54	S55	Σ	%	Kategori	S63	S64	S65	Σ	%	Kategori	S66	S67	Σ	%	Kategori	Akuntabilitas	Kategori
R027	3	3	6	60	SD	3	4	5	12	80	T	4	4	8	80	T	26	T
R028	4	4	8	80	T	4	4	3	11	73.33	T	4	4	8	80	T	27	T
R029	5	4	9	90	ST	4	4	4	12	80	T	4	4	8	80	T	29	T
R030	4	4	8	80	T	4	4	3	11	73.33	T	4	3	7	70	T	26	T
R031	3	4	7	70	T	4	4	4	12	80	T	4	4	8	80	T	27	T
Jumlah	125	121	246			121	126	118	365			125	127	252			863	
Rata-rata	4.03	3.90	7.93	79.35	T	3.90	4.06	3.81	11.77	78.49	T	4.03	4.10	8.13	81.30	T	27.84	

Keterangan:

ST = Sangat tinggi

T = Tinggi

SD = Sedang

R = Rendah

SR = Sangat rendah

ANALISIS DESKRIPTIF PERSENTASE VARIABEL X dan Y

KODE RESP	X1			X2			X3			Y		
	Skor	%	Krit	Skor	%	Krit	Skor	%	Krit	Skor	%	Krit
R01	20	100	ST	35	87.5	ST	32	91.43	ST	34	97.14	ST
R02	20	100	ST	40	100	ST	35	100.00	ST	35	100.00	ST
R03	17	85	ST	31	77.5	T	25	71.43	T	30	85.71	ST
R04	12	60	SD	26	65	SD	24	68.57	T	24	68.57	T
R05	17	85	ST	33	82.5	T	28	80.00	T	31	88.57	ST
R06	15	75	T	30	75	T	25	71.43	T	24	68.57	T
R07	18	90	ST	28	70	T	28	80.00	T	27	77.14	T
R08	16	80	T	28	70	T	28	80.00	T	32	91.43	ST
R09	17	85	ST	30	75	T	32	91.43	ST	26	74.29	T
R10	20	100	ST	28	70	T	27	77.14	T	29	82.86	T
R11	16	80	T	34	85	ST	28	80.00	T	30	85.71	ST
R12	19	95	ST	34	85	ST	31	88.57	ST	35	100.00	ST
R13	19	95	ST	37	92.5	ST	34	97.14	ST	34	97.14	ST
R14	15	75	T	32	80	T	28	80.00	T	29	82.86	T
R15	15	75	T	33	82.5	T	27	77.14	T	29	82.86	T
R16	16	80	T	32	80	T	28	80.00	T	28	80.00	T
R17	15	75	T	23	57.5	SD	22	62.86	SD	24	68.57	T
R18	15	75	T	31	77.5	T	26	74.29	T	27	77.14	T
R19	16	80	T	29	72.5	T	26	74.29	T	28	80.00	T

R20	15	75	T	36	90	ST	29	82.86	T	30	85.71	ST
R21	17	85	ST	28	70	T	25	71.43	T	28	80.00	T
R22	16	80	T	30	75	T	27	77.14	T	27	77.14	T
R23	19	95	ST	35	87.5	ST	34	97.14	ST	35	100.00	ST
R24	16	80	T	34	85	ST	28	80.00	T	30	85.71	ST
R25	14	70	T	29	72.5	T	26	74.29	T	25	71.43	T
R26	17	85	ST	30	75	T	25	71.43	T	26	74.29	T
R27	20	100	ST	37	92.5	ST	26	74.29	T	30	85.71	ST
R28	13	65	SD	30	75	T	27	77.14	T	27	77.14	T
R29	18	90	ST	30	75	T	29	82.86	T	30	85.71	ST
R30	15	75	T	29	72.5	T	26	74.29	T	25	71.43	T
R31	14	70	T	27	67.5	SD	27	77.14	T	25	71.43	T
Jumlah	512			969			863			894		
Rata-rata	16.56	82.58	T	31.26	78.15	T	27.84	79.54	T	28.84	82.40	T

Keterangan:

ST = Sangat tinggi

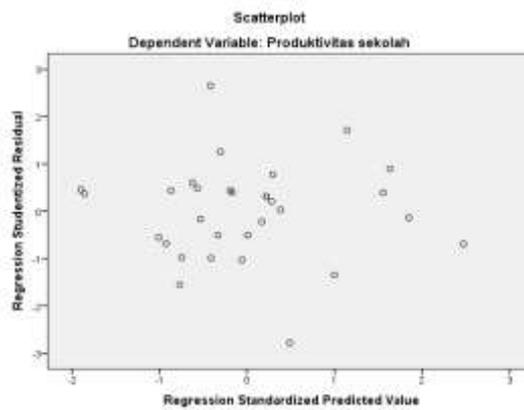
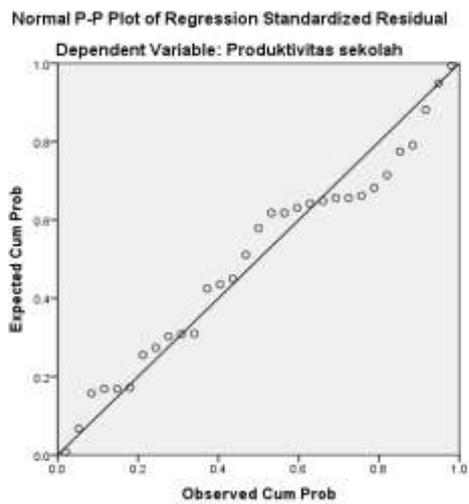
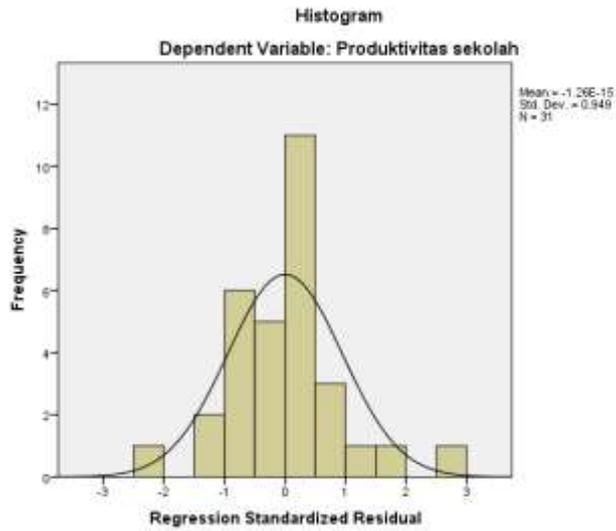
T = Tinggi

SD = Sedang

R = Rendah

SR = Sangat rendah

Lampiran Output SPSS Uji Asumsi Klasik



Lampiran 14

Lampiran Output SPSS Uji Hipotesis

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.871 ^a	.759	.732	1.73311

a. Predictors: (Constant), Akuntabilitas, Prinsip keadilan, Tranparansi

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	255.094	3	85.031	28.309	.000 ^p
	Residual	81.099	27	3.004		
	Total	336.194	30			

a. Dependent Variable: Produktivitas sekolah
 b. Predictors: (Constant), Akuntabilitas, Prinsip keadilan, Tranparansi

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.132	3.142		.042	.967
	Prinsip keadilan	.521	.188	.331	2.764	.010
	Tranparansi	.310	.126	.340	2.456	.021
	Akuntabilitas	.374	.160	.339	2.344	.027

a. Dependent Variable: Produktivitas sekolah

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations		
		B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part
1	(Constant)	.132	3.142		.042	.967			
	Prinsip keadilan	.521	.188	.331	2.764	.010	.714	.470	.261
	Tranparansi	.310	.126	.340	2.456	.021	.761	.427	.232
	Akuntabilitas	.374	.160	.339	2.344	.027	.778	.411	.222

a. Dependent Variable: Produktivitas sekolah



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI
Gedung C, Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang – 50229
Telp. +62248508015 Fax. +62248508015
Laman: <http://fe.unnes.ac.id> email: fe@unnes.ac.id

Nomor :1888/UN37.L7/PP/2015
Hal : **Ijin Penelitian**

4 Agustus 2015

Yth. Kepala SMP N 3 Mertoyudan
Jl. Letnan Tukiyat km 3 Citran, Donorejo
Magelang

Diberitahukan dengan hormat bahwa, mahasiswa kami:

N a m a : M. Hidayat Dwi Setyawan
N I M : 710 141 0051
Jurusan/Konsentrasi : Pend. Ekonomi / Pend. Akuntansi

Bermaksud akan menyusun skripsi dengan judul "**Pengaruh Prinsip Keadilan, Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Terhadap Produktivitas Sekolah (studi kasus di SMP N 3 Mertoyudan Kabupaten Magelang)**". Berkemauan dengan hal tersebut mohon kiranya yang bersangkutan dapat diijinkan untuk dapat melakukan penelitian di Sekolah/Instansi yang Saudara pimpin dengan alokasi waktu bulan Agustus 2015 sd. selesai.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Dekan
Pembantu Dekan Bidang Akademik,

Drs. Heri Yanto, MBA., PhD.
NIP. 196707181987021001

Tembusan Yth.:
1. Dekan
2. Kejur. Pend. Ekonomi
Fakultas Ekonomi Unnes

FM-05-AKD-24



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
SMP NEGERI 3 MERTOYUDAN
Alamat : Jl. Letnan Tukiyat Km.3 Citran, Donorojo, Mertoyudan Magelang Telp (0293) 3301004

SURAT KETERANGAN
Nomor : 219 / 233 / 20.24.SMP/2015

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala SMP Negeri 3 Mertoyudan Kabupaten Magelang menerangkan dengan sesungguhnya bahwa

Nama : M. Hidayat Dwi Setyawan
NIM : 710 141 0051
Jurusan /Konsentrasi : Pend Ekonomi / Pend Akuntansi
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang

Mahasiswa tersebut di atas telah selesai melakukan penelitian dengan judul **"Pengaruh Prinsip Keadilan, Transparansi dan Akuntabilitas pengelolaan Anggaran Terhadap produktifitas Sekolah(studi kasus)** di SMP N 3 Mertoyudan Kabupaten Magelang.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.



Mertoyudan, 13 Agustus 2015
KEPALA SEKOLAH,

Dra. Nianik Istahtri Nugrahantini, M.Pd
NIP. 19630515 198803 2 005